

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	1
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	10
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	13
a. Permasalahan strategis daerah	13
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	14
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	16
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	25
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	76
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	78
2.1. Capaian Kinerja Makro	78
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	82
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	83
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	132
c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	145
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	146
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.	146

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	149
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	153
d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja.....	156
e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja..	185
f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai.....	198

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 208

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah	208
3.1.1. Target Kinerja	208
3.1.2. Realisasi	209
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah.....	213
3.2.1. Target Kinerja	213
3.2.2. Realisasi	213
3.3. Permasalahan dan Kendala	213
3.4. Saran dan Tindaklanjut.....	213

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 214

4.1. Urusan Pendidikan	214
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	214
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	214
4.1.3. Realisasi	216
4.1.4. Alokasi anggaran	218
4.1.5. Dukungan Personil.....	218
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	219
4.2. Urusan Kesehatan.....	221
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	221
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	222
4.2.3. Realisasi	225
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	228

4.2.5. Dukungan Personil.....	228
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	229
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	230
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	230
4.3.2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	230
4.3.3. Realisasi	231
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	231
4.3.5. Dukungan Personil.....	232
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	232
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	232
4.4.1. Jenis pelayanan Dasar	232
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	232
4.4.1. Realisasi	233
4.4.3. Alokasi Anggaran.....	234
4.4.4. Dukungan Personil.....	234
4.4.5. Permasalahan dan Solusi	234
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	235
4.5.1. Jenis pelayanan Dasar	235
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	235
4.5.3. Realisasi	240
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	245
4.5.5. Dukungan Personil.....	246
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	246
4.6. Urusan Sosial	247
4.6.1. Jenis pelayanan Dasar	247
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	247
4.6.3. Realisasi	249
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	250

4.6.5. Dukungan Personil.....	250
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	251
4.7. Program dan Kegiatan.....	251
BAB V PENUTUP	255

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen	2
Tabel 1.2 Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen	4
Tabel 1.3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	4
Tabel 1.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen	6
Tabel 1.5 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ...	7
Tabel 1.6 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	11
Tabel 1.7 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020	27
Tabel 1.8 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen	66
Tabel 1.9 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020.....	74

BAB II

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019 -2020	78
Tabel 2.2 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	83
Tabel 2.3 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	132
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2020	145
Tabel 2.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	147
Tabel 2.6 Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Kebumen.....	150
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020 Terhadap RPJMD	153

Bab III

Tabel 3.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2020	210
---	-----

Bab IV

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020	214
Tabel 4.2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020.....	216
Tabel 4.3 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020	222
Tabel 4.4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020	225
Tabel 4.5 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020.....	230
Tabel 4.6 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020.....	231
Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020.....	232

Tabel 4. 8	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020.....	233
Tabel 4. 9	Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2020	235
Tabel 4. 10	Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2020	240
Tabel 4. 11	Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020.....	247
Tabel 4. 12	Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020.....	249

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	2
Gambar 2. Peta Topografi Kabupaten Kebumen	3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	79
Grafik 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	80
Grafik 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	81
Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kebumen	81
Grafik 5. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017-2020 Kabupaten Kebumen	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen mendasari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

b. Data Geografis Wilayah

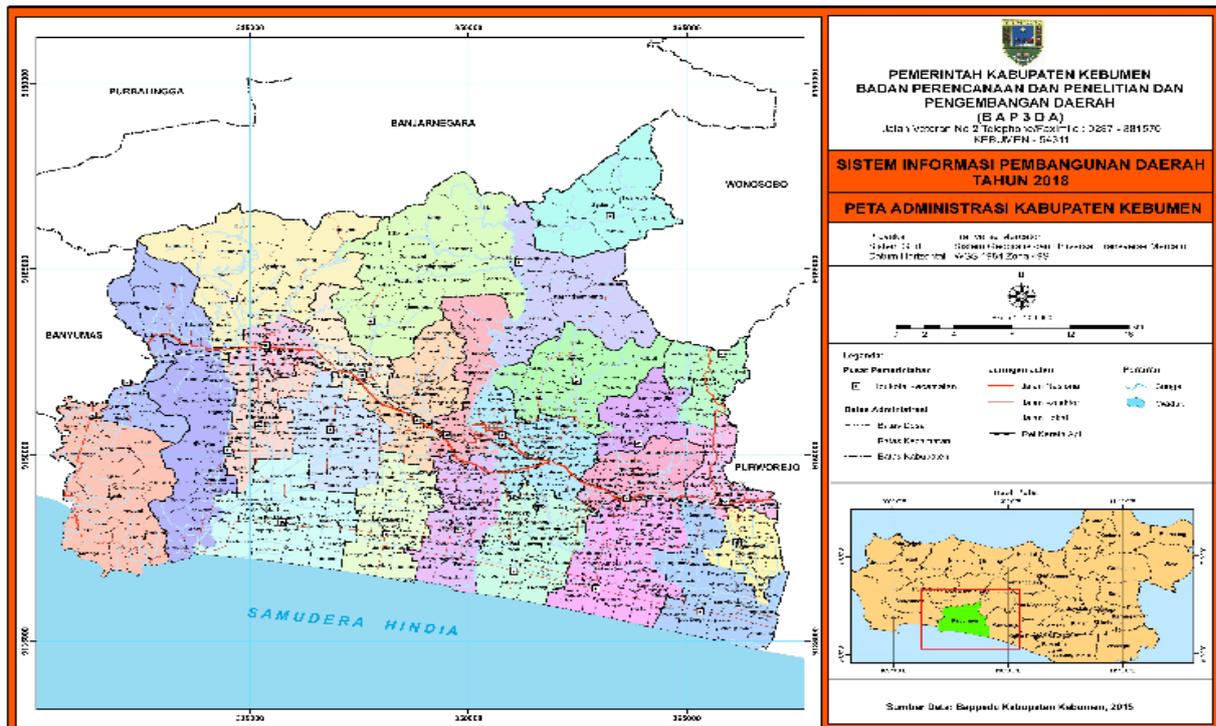
Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Gambar 1.

Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber : BAP3DA Kab. Kebumen, 2021

Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

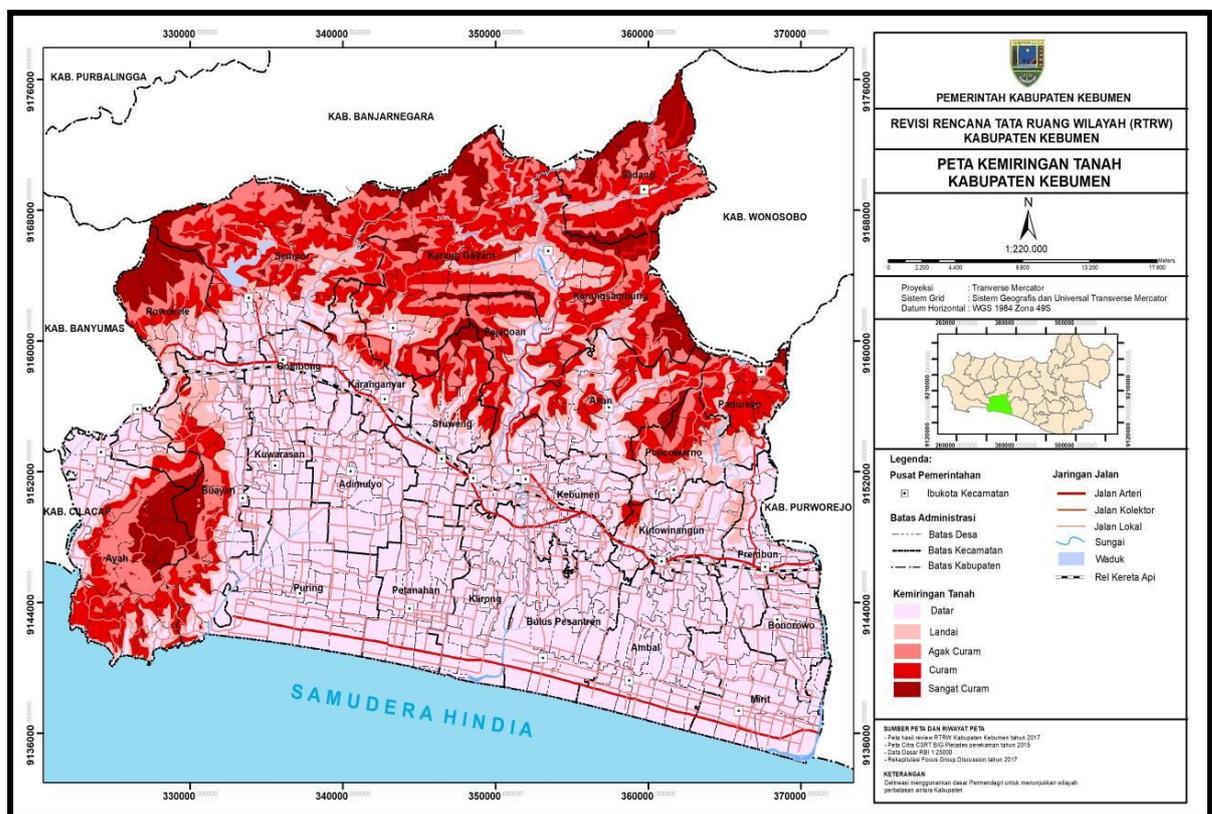
Sumber: Kebumen dalam Angka, Tahun 2020

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Gambar 2.

Peta Topografi Kabupaten Kebumen



Sumber: BAP3DA, Peta Revisi RTRW, 2021

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang

terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: BAP3DA Kabupaten Kebumen, 2021

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.394.038 jiwa, tumbuh sebesar 0,4% dari tahun 2019. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 707.236 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 686.802 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 3

Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AYAH	33.266	32.205	65.471
2	BUAYAN	34.002	32.528	66.530
3	PURING	32.851	31.970	64.821
4	PETANAHAN	30.778	30.177	60.955

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	KLIRONG	33.126	32.362	65.488
6	BULUSPESANTREN	30.478	29.261	59.739
7	AMBAL	32.629	31.380	64.009
8	MIRIT	27.669	26.725	54.394
9	PREMBUN	14.744	14.711	29.455
10	KUTOWINANGUN	25.004	24.209	49.213
11	ALIAN	34.948	33.224	68.172
12	KEBUMEN	68.071	66.394	134.465
13	PEJAGOAN	28.473	27.251	55.724
14	SRUWENG	31.944	31.277	63.221
15	ADIMULYO	19.057	19.315	38.372
16	KUWARASAN	26.348	25.511	51.859
17	ROWOKELE	26.434	26.016	52.450
18	SEMPOR	35.965	34.835	70.800
19	GOMBONG	25.551	25.746	51.297
20	KARANGANYAR	19.337	19.074	38.411
21	KARANGGAYAM	30.805	29.444	60.249
22	SADANG	11.866	11.145	23.011
23	BONOROWO	11.355	10.969	22.324
24	PADURESO	8.602	8.392	16.994
25	PONCOWARNO	9.553	9.201	18.754
26	KARANGSAMBUNG	24.380	23.480	47.860
	JUMLAH	707.236	686.802	1.394.038

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 berkisar antara 102%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 102 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.465 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 16.994 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombang, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen

Tabel 1. 4

Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1930	7127

Sumber : BAP3DA Kab. Kebumen, 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Tabel 1. 5

Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah	94	63	157
2.	Staf Ahli Bupati	1	1	2
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	32	20	52
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	4	23
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26	26	52
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	38	13	51
7.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21	16	37
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	11	19
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	27	12	39
10.	Dinas Kepemudaan dan	56	11	67

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
	Olahraga dan Pariwisata			
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	15	32
12.	Dinas Kesehatan	485	1369	1854
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22	11	33
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192	28	220
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	19	40
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	28
17.	Dinas Pendidikan	3055	3720	6775
18.	Dinas Perhubungan	36	7	43
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	88	20	108
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	61	56	117
21.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	39	18	57
22.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat	16	2	18
23.	UPT Daerah Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur	36	8	44
24.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18	13	31
25.	Dinas Tenaga Kerja dan	34	19	53

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
26.	Inspektorat	25	16	41
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3	15
28.	Kecamatan Adimulyo	15	5	20
29.	Kecamatan Alian	13	1	14
30.	Kecamatan Ambal	10	4	14
31.	Kecamatan Ayah	14	6	20
32.	Kecamatan Bonorowo	13	3	16
33.	Kecamatan Buayan	16		16
34.	Kecamatan Buluspesantren	8	5	13
35.	Kecamatan Gombong	10	5	15
36.	Kecamatan Karanganyar	11	5	16
37.	Kecamatan Karanggayam	12	1	13
38.	Kecamatan Karangsembung	13	4	17
39.	Kecamatan Kebumen	8	4	12
40.	Kecamatan Klirong	11	2	13
41.	Kecamatan Kutowinangun	15	3	18
42.	Kecamatan Kuwarasan	14	3	17
43.	Kecamatan Mirit	9	6	15
44.	Kecamatan Padureso	8	2	10
45.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
46.	Kecamatan Petanahan	10	7	17
47.	Kecamatan Poncowarno	12	3	15
48.	Kecamatan Prembun	6	11	17
49.	Kecamatan Puring	16	2	18
50.	Kecamatan Rowokele	9	5	14
51.	Kecamatan Sadang	9	3	12
52.	Kecamatan Sempor	13	4	17
53.	Kecamatan Sruweng	13	3	16

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
54.	Kelurahan Bumirejo	3	3	6
55.	Kelurahan Gombong	4	2	6
56.	Kelurahan Jatiluhur	4	4	8
57.	Kelurahan Karanganyar	7	1	8
58.	Kelurahan Kebumen	1	4	5
59.	Kelurahan Panjatan	5	2	7
60.	Kelurahan Panjer	3	2	5
61.	Kelurahan Plarangan	5	3	8
62.	Kelurahan Selang	5	2	7
63.	Kelurahan Tamanwinangun	3	4	7
64.	Kelurahan Wonokriyo	6	1	7
65.	Sanggar Kegiatan Belajar	6	5	11
66.	Satuan Polisi Pamong Praja	47	3	50
67.	Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	21	8	29
68.	Sekretariat KPU	1	1	2
	JUMLAH	4913	5661	10.574

Sumber : BKPPD Tahun 2020

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini tercermin pada proses

penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami trend atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu. Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikut ini disajikan tabel data tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 .

Tabel 1. 6

Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
I	BELANJA	2.898.185.103.000	2.737.715.628.080	94,46%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.870.474.061.000	1.791.140.378.464	95,76%
	Belanja Pegawai	1.137.941.281.000	1.069.722.845.778	94,01%
	Belanja Hibah	83.175.383.000	81.112.633.737	97,52%
	Belanja Bantuan Sosial	34.248.370.000	30.833.250.000	90,03%
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000	13.527.756.700	98,77%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	586.167.850.000	585.755.067.000	99,93%
	Belanja Tidak Terduga	15.245.000.000	10.188.825.249	66,83%
	BELANJA LANGSUNG	1.027.711.042.000	946.575.249.616	92,11%
	Belanja Pegawai	110.067.517.000	99.973.754.872	90,83%
	Belanja Barang dan Jasa	604.262.315.000	557.802.742.626	92,31%
	Belanja Modal	313.381.210.000	288.798.752.118	92,16%
II	PENDAPATAN	2.703.567.185.000,00	2.762.972.213.945,80	102,20%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	326.820.579.000,00	403.011.163.100,80	123,31%
	Pendapatan Pajak Daerah	89.697.000.000,00	100.877.584.517,00	112,46%
	Hasil Retribusi Daerah	23.587.096.000,00	22.068.306.403,00	93,56%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.243.497.000,00	15.727.758.649,00	118,76%

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.292.986.000,00	264.337.513.531,80	131,98%
	DANA PERIMBANGAN	1.629.897.944.000,00	1.624.225.405.094,00	99,65%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.335.926.000,00	35.146.538.958,00	96,73%
	Dana Alokasi Umum	1.206.245.637.000,00	1.197.504.293.000,00	99,28%
	Dana Alokasi Khusus	387.316.381.000,00	391.574.573.136,00	101,10%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	746.848.662.000,00	735.735.645.751,00	98,51%
	Pendapatan Hibah	135.310.300.000,00	136.507.976.560,00	100,89%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	142.141.828.000,00	130.966.524.602,00	92,14%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.243.665.000,00	45.243.665.000,00	100,00%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.127.000.000,00	17.991.610.589,00	94,06%
	Pendapatan Lainnya	405.025.869.000,00	405.025.869.000,00	100,00%
III	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	204.167.918.000	204.132.918.416,18	99,98%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	202.667.918.000	202.667.918.416,18	100%
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000	1.465.000.000	97,67%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.550.000.000	9.550.000.000	100%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.050.000.000	8.050.000.000	100%
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
	PEMBIAYAAN NETTO	194.617.918.000	194.582.918.416,18	99,98%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020
Ket: Data Belum Audit BPK

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 merupakan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016-2021, yang menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, antara lain:

- 1) Masih tingginya persentase dan jumlah penduduk miskin serta ketimpangan;
- 2) Masih tingginya angka pengangguran;
- 3) Pertumbuhan Ekonomi masih harus ditingkatkan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan pengelolaan potensi pariwisata, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata;
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan daya saing tenaga kerja;
- 5) Penurunan kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta potensi bencana yang tinggi;
- 6) Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih harus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Permasalahan yang menonjol pada tahun 2020 ini adalah pengangguran. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 5,52% pada akhir tahun 2019. Angka pengangguran tersebut diprediksi akan semakin meningkat karena terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Diperlukan usaha untuk menangani angka pengangguran yang akan meningkat ini dengan kegiatan jaring pengaman ekonomi, seperti bantuan modal bagi UMKM dan program padat karya produktif.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah:

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
3. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
4. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
5. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan. Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 6 (enam) sasaran yaitu:

- a. membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
- c. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- f. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna

menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung operasional, dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal;
- c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- d. Program Pendidikan Menengah;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
dan
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- i. Program Pengawasan Obat dan Makanan;

- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- l. Program Badan Layanan Umum Daerah; dan
- m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
- g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- j. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya;
- k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
- m. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- n. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
- o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- p. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- q. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- r. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- s. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- t. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
 - u. Program Pengendalian Banjir.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
 - c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan
 - h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
6. Sosial
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - d. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma;
 - e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
 - f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
- b. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
- c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Pengendalian Banjir;
- f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
- g. Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

- j. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
 - k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - l. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - b. Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
 - e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan;
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan
 - c. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga.
9. Perhubungan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 - b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
- c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
- e. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- e. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja BUMD.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15. Persandian

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; dan
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan);
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; dan
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

4. Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
- c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

6. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

7. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Struktur Industri;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
- e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

8. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- e. Program Kerjasama Pembangunan;

- f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
 - g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;
 - h. Program Pengembangan Data/Informasi;
 - i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
 - j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
2. Keuangan
- Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 - e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi Lainnya
- Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan

- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

Hal ini untuk lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RKPD Tahun 2020. Sinergi antara prioritas dan sasaran

pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 1. 7
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan		
	a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung sekolah - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD - Fasilitasi BOP PAUD - Pembinaan PAUD Negeri - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini - Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini - Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 	
	b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Pengadaan mebeluer sekolah - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar - Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa - Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) - Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP - Fasilitasi Pendidikan Inklusi - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP - Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK untuk pemenuhan SPM Pendidikan 	
	c. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pendidikan keaksaraan - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal - Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal - Penyelenggaraan paket A setara SD - Penyelenggaraan paket B setara SMP - Penyelenggaraan paket C setara SMU 	
	d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Sertifikasi pendidik, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi - Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 	
	e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 	
2.	Kesehatan		
	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Revitalisasi Posyandu untuk peningkatan kapasitas petugas promkes, pengelola prokjanal dan kader posyandu 	
	c. Program Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya - Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 	
	d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat - Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat (Desa Siaga) - Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen 	
	e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk pemulihan kepada balita gizi buruk dan suplemen gizi - Taburia bagi anak usia 6 - 59 bulan - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) - Anemia Gizi Besi - Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) - Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya - Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI) 	
	f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyehatan Lingkungan - Surveilans Kualitas Air 3 kali 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular - Peningkatan imunisasi - Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 	
	h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan standar pelayanan kesehatan - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 	
	i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas - Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 	
	j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Pengembangan ruang operasi - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) - Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	
	l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	- Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	
	m. Program BLUD		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	- peningkatan jalan dan jembatan	
	b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan jalan	
		- pembangunan jalan	
		- penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jembatan	
		- pembangunan jembatan	
		- monitoring dan evaluasi	
	c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	- pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	
	d. Program Pembangunan	- Perencanaan turap/talud/bronjong	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Turap/Talud/ Bronjong	- Pembangunan turap/talud/bronjong	●
	e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	●
		- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
		- Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	●
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	
	f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	- Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	
	g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	- Pengadaan alat-alat berat	
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	
	h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	●
		- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan target	
		- Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	
	i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	- pembangunan SPAM	●
		- pemeliharaan SPAM	●
	j. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	- Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	
		- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan	
		- Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman, serta Perencanaan Gedung	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya	- rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	●
		- Pengembangan sarana dan prasarana irigasi pertanian	●
	l. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	- Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	●
		- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	●
		- Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	
	m. Program Pengendalian Banjir	- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	
		- Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
		- Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	●
		- Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	
		- Pembangunan Infrastruktur Pengairan Pasca Bencana Alam	
	n. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Pengawasan pemanfaatan ruang	
	o. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
		- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
	p. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
		- Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	bencana alam	bencana alam - Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam - Droping air bersih - Pelatihan penanggulangan bencana - Penyusunan peta resiko rawan bencana - Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana - Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan - Pengembangan sekolah aman bencana - Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	a. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	- Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	
	b. Program Pengembangan Perumahan	- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	
	c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	- Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran - Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan - Pengendalian keamanan lingkungan, Rakor Kamtibmas - Rakor Kamtibmas, Evaluasi Kamtibmas dan jumlah informasi intelejen - Pembinaan Anggota Linmas dan Pelatihan Anggota Linmas 	
	b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa - Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat - Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah - Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ 	
	c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya - Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan - Pendayagunaan Potensi Organisasi Masyarakat - Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya 	
	d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial - Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum 	
	e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Masyarakat (Pekat)		
	f. Program Pendidikan Politik Masyarakat	- sosialisai kepada pengurus parpol, ormas, tokoh masyarakat perempuan terkait pilkada 2020 - Koordinasi forum-forum diskusi politik	
	g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah - Penegakan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu	
6.	Sosial		
	a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS - Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin - Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	
	b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dan Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal - Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS - Pendataan PMKS dan PSKS 	
	c. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma	- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	
	d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 	
	e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	- Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1.	Tenaga Kerja		
	a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, kerjasama pendidikan dan pelatihan, penyiapan tenaga kerja siap pakai - Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja, dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna 	
	b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan balai latihan kerja - Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja - Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK - Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja 	
	c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan - Pembinaan Ketenagakerjaan LKS Tripartit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak; Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan - sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	
	b. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi perempuan 	
	c. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan PKK - Pembinaan Berbasis Gender 	
3.	Pangan		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan daerah rawan pangan - Pengembangan cadangan pangan daerah - Pengembangan lumbung pangan desa - Pengembangan model distribusi pangan yang efisien - Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan 	
4.	Pertanahan		
	Program Penataan Penguasaan,	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		
5.	Lingkungan Hidup		
	a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan Oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 	
	b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Pengkajian Dampak Lingkungan - Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup - Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan - Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL 	
	c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Alam		
	d. Program Lingkungan Sehat Perumahan	- Penanganan kawasan kumuh perkotaan	
	e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	
		- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	
	f. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	
	g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	
		- Pengembangan data dan informasi lingkungan	
		- Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	
	h. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Penyusunan program pengembangan RTH	
		- Penataan RTH dalam rangka peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	
		- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	
		- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	
		- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil - Sosialisasi kebijakan kependudukan - Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat - Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil - Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu - Pengembangan data base kependudukan 	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi program pembangunan perdesaan - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat - Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas - Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM - Pengembangan dan pembinaan sosial budaya masyarakat dan adat istiadat 	
	b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa - Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan - Pembinaan Pasar Desa 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Pemberian stimulan pembangunan desa - Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) - Fasilitasi Alokasi Dana Desa - Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan - Pelaksanaan Lomba Desa - Fasilitasi APBDes - Fasilitasi program pembangunan - Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari - Desa Pemula dan Desa Prakarsa 	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a. Program Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin - Pelayanan KIE - Pembinaan Petugas Keluarga Berencana - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB - Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB - Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	b. Program Pelayanan Kontrasepsi	- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	
	c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	- Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga	
9.	Perhubungan		
	a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
	b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	- Rehab/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	
		- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	
		- Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	
	c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	- pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	
		- penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	
		- penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	
		- Pengembangan Sarpras pelayanan jasa angkutan	
		- Fasilitasi Perijinan di bidang perhubungan	
		- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	
	d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan pagar pengaman jalan - Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas - Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan - Operasi Laik Jalan, Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas - Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas - Pengendalian dan pengelolaan parkir - Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengguna Jalan - Pembinaan Keselamatan Transportasi 	
	e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - penyediaan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen - Pengembangan dan Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan - Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 	
10.	Komunikasi dan Informatika		
	a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi - Pengadaan Alat studio dan Komunikasi 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika - Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - Pengembangan Media Alternatif 	
	b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 	
	c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 	
	d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 	
11.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah - Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 	
	b. Program Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
		- Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	
	c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
		- Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	
	d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	
		- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern	
12.	Penanaman Modal		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	
		- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	
		- Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	
		- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
		- Penyelenggaraan pameran investasi	
		- pemetaan potensi investasi daerah	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
13.	Kepemudaan dan Olahraga		
	a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi kepemudaan - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan 	
	b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan kompetisi olahraga 	
	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 	
14.	Statistik		
	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah - Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan 	
15.	Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk rehab cagar budaya - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 	
16.	Perpustakaan		
	Program Pengembangan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan minat dan budaya baca 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat - Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan - Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah - Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka 	
17.	Kearsipan		
	a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah - Penataan dan pemeliharaan arsip daerah 	
C.	Urusan Pilihan		
1.	Kelautan dan Perikanan		
	a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan pelaku usaha perikanan 	
	b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan bibit ikan unggul - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan - pembentukan kampung nila, bantuan kolam, bibit dan pakan ikan untuk rumah tangga miskin - Pembinaan dan pengembangan perikanan 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - pembangunan tempat pelelangan ikan - rehabilitasi tempat pelelangan ikan - Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap - Pengembangan sarana alat tangkap - Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan - perlindungan nelayan terhadap bencana alam laut 	
	d. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul - fasilitasi sarpras usaha garam rakyat - bantuan ikan segar dan olah 	
2.	Pariwisata		
	a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 	
	b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - pengembangan, sosialisasi dan penerapan swera pengawasan standarisasi - Pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas obyek wisata 	
	c. Program Pengembangan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata - Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Evaluasi Korban Kecelakaan di Obyek 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		wisata	
3.	Pertanian		
	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani - pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - pemberian alat pasca panen - pengembangan intensifikasi tanaman padi - pengembangan diversifikasi tanaman - Sosialisasi dan pembinaan pengembangan sentra tanam hortikultura dan buah-buahan - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 	
	b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 	
	c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Pembangunan/perbaikan balai penyuluhan pertanian di kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan - Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau 	
	e. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan masalah peternakan - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert) 	
	f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembibitan dan perawatan ternak - Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak - Pengembangan agribisnis peternakan - Fasilitasi Pendataan Peternakan 	
	g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan 	
5.	Perdagangan		
	a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah - Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai 	
	b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan pelayanan perijinan bangunan dan lingkungan - peningkatan pelayanan perijinan prinsip dan pemakaian kekayaan daerah - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha terkait dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi 	
	d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 	
6.	Perindustrian		
	a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 	
	b. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan perizinan perdagangan, pertanian dan perikanan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan industri kecil dan menengah sektor industri agro, kimia dan hasil hutan 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	c. Program Penataan Struktur Industri	- Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	
7.	Transmigrasi		
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	- pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Perencanaan		
	a. Program Pengembangan Data/Informasi	- Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan dokumen perencanaan	
		- pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	
		- Penyusunan profile daerah	
	b. Program Kerjasama Pembangunan	- Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)	
		- Peningkatan kerjasama desa	
	c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	
		- Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kajian pendukung perencanaan	
	d. Program Perencanaan	- Penetapan RPJMD Teknokratis	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang RKPD - Penetapan RKPD - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi 	
	e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - Penyusunan indikator ekonomi daerah - Koordinasi Perencanaan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan - Koordinasi Perencanaan sub bidang produksi 	
	f. Program Perencanaan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan sub bidang pemerintahan dan pendidikan - Koordinasi Perencanaan sub bidang kesejahteraan rakyat dan sosial - Penyusunan data kemiskinan 	
	g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah - Koordinasi Perencanaan pembangunan sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 	
	h. Program Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - koordinasi rencana tata ruang dan revisi rencana tata ruang 	
2.	Keuangan		
	a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah - Pendataan obyek dan subyek pajak daerah 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Keuangan Daerah		
		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan verifikasi obyek dan subyek pajak daerah - Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak daerah - Peningkatan manajemen aset/barang daerah dan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah - Penyusunan analisa standar belanja - Penyusunan standar satuan harga - Pengelolaan Belanja Langsung - Pengelolaan Belanja Tidak Langsung - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Peningkatan manajemen aset/barang daerah - Penyusunan KU APBD dan PPAS - Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah 	
	b. Program Pembinaan dan	- fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota - Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah - Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial - Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 	
3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemerintah Daerah - Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS 	
	b. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan tugas PNS 	
	c. Program Pendidikan Kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan teknis - Peningkatan keterampilan dan profesionalisme 	
	d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah - Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah - Pengiriman peserta ujian dinas, ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar 	
	e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS - Seleksi dan pembekalan serta pelantikan/ pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Pembinaan karier/ penilaian angka kredit jabatan fungsional	
		- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
		- Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	
		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		- Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	
		- Penyusunan Analisis Beban Kerja	
		- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
		- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
		- Seleksi penerimaan calon PNS	
		- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
		- Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	
		- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	
		- Proses penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS	
		- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		- Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	
		- Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	
		- Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	
		- Penyusunan data formasi dan DUK	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	
		- Fasilitasi penataan aset-aset desa	
	g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
		- Pendidikan dan pelatihan formal	
	h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
4.	Fungsi Lainnya		
	a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	- koordinasi dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan subbag perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil, dan menengah	
		- Koordinasi dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan subbag sumber daya alam dan tenaga kerja	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pemerintahan	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Infrastruktur Daerah	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Kesehatan	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Kemasyarakatan	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	
		- Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa - Pengendalian Kas Daerah - Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Evaluasi LAKIP Bupati - Review Laporan Keuangan - Implementasi SPIP 	
	b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan - Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundang-undangan - Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang- 	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
		undangan daerah	
		- Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	
	c. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	
		- Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	
		- Penyediaan jasa jaminan kesehatan, Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Luar Negeri	
	d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	- Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
		- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
	e. Program Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	- Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	
	f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	- Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	
		- Rapat-rapat paripurna	
		- Kegiatan Reses	
		- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	
		- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	

NO.	URUSAN/PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
	g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

Keterangan ● Prioritas penanganan dampak Covid-19

Sumber : RKPD 2020

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas							
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
				2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	d	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
				6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
				7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
				9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
				10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
<p>Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>							
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidup-an berbangsa dan bernega-ra berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama
				2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan							
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				2	Mengembang-kan kawasan perdesaan	b	Pembangun-an wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
				3	Mengembangkan Kawasan Industri		
				4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.
				5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				6	Penganekara-gaman ketahanan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
				7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
				8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegi-atan perda-gangan dalam negeri dalam usaha mening-katlan kese-jahtaan para pelaku usaha dan masyara-kat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.
				9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
				10	Meningkatkan akses permo-dalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	g	
				11	Mengembang-kan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan eko-nomi ber-basis syariah
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkat-nya daya saing investasi daerah	12	Mengembang-kan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
		2.2	Meningkat-nya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat
3.	Mewujudkan	3.1	Meningkat-nya	14	Meningkatkan kualitas dan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	pelayan-an infra-struktur yang mendukung pengembangan wilayah		kapasitas jalan dan jembatan		infrastruktur wilayah		
		15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi				
		16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi				
		17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan pening-katan kualitas sarana - prasatana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah		
		18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa				
		19	Meningkatkan kapasitas sarana dan pra-sarana bidang keciptakarya-an	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya		
		20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA		
		21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik		
		22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang tenaga-listrikan		

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkat-nya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan							
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkat-nya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulang-an kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Mewujudkan iklim yang	2.1	Meningkat-nya keterserapan	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran		tenaga kerja	3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat							
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
		1.2	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan,							

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
pemahaman dan pendalaman agama							
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkat-nya kapasi-tas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Good and Clean Governance</i>)
				2	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangun-an menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesimambungan
		1.2	Meningkat-nya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 11 (sebelas) Tujuan, 16 (enam belas) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran yaitu :

- a. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran;
- b. Misi II terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran;
- c. Misi III terdapat 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran;
- d. Misi IV terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran;
- e. Misi V terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran; dan
- f. Misi VI terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Tabel 1. 9

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,04	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,20
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	61,47	63,39
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	24	65,38
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,97	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	75	68/ 100.000 KH
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,75	10,5
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagama-an	%	35,13	37,65%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hokum	Kasupra sarans	600	500 kasus

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	%	1-3	6
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	13.890,0	25.179,48
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,22	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	5	6 Unit
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	1	6
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15-16	19,69
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	61,88	62,88
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,00	77,5
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18-19	15,45
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	4-5	1,97%
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	82,73	83,87%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	96	96%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	B 3
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B 60
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	80%

Sumber data : Dokumen RKPD Tahun 2020

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan :

1. Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu :
 - 1) Perumusan permasalahan pembangunan ;
 - 2) Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.
 - b. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb :
 - 1) Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;
 - 2) Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);

- 3) Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota
 - 4) Dukungan nilai tambah.
2. Integrasi SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. Integrasi SPM dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah;
 4. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 5. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita serta Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio). Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019 -2020

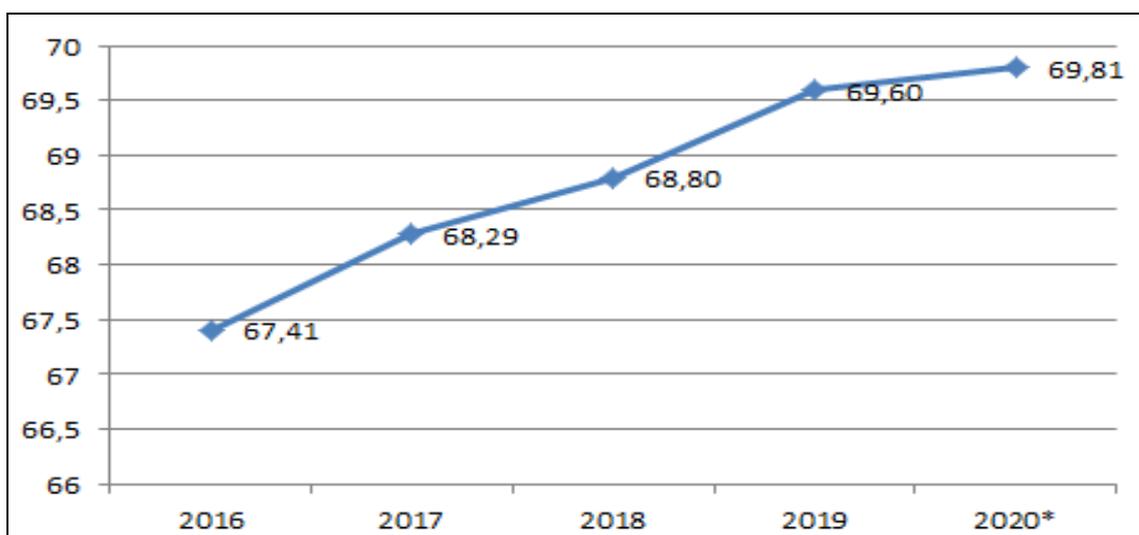
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	69,81	0,21
2	Angka Kemiskinan	16,82%	17,59%	0,007
3	Angka Pengangguran	4,76%	6,07%	0,013
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,58%	0%	-0,055
5	Pendapatan per Kapita	23.156, 27	21.780,00	0,940
6	Ketimpangan Pendapatan (gini Ratio)	0,22	0,21	-4,5

Sumber Data : Diolah dari berbagai sumber, 2021

IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Kebumen sebesar 67,41 meningkat menjadi 69,81 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 5 tahun terakhir semakin membaik. Pandemi Covid-19 menyebabkan kualitas kesehatan penduduk dan daya beli masyarakat turun yang merupakan komponen pembentuk IPM. Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir, namun jika dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020 Nilai IPM Kabupaten Kebumen sebesar 68,81 sedangkan nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional berturut-turut sebesar 71,81 dan 71,94.

Grafik 1.

Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



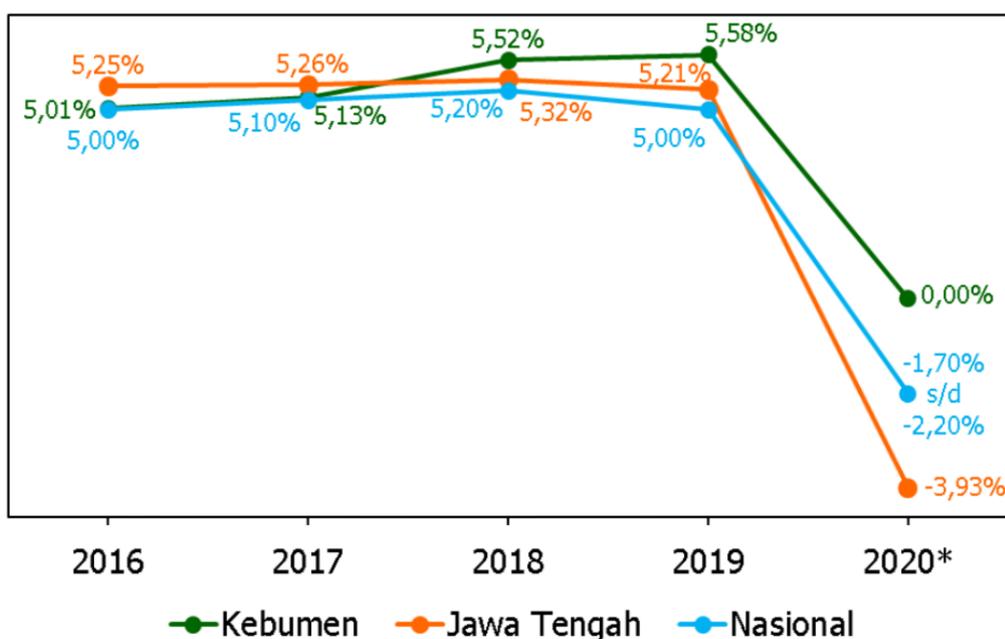
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2021 (data diolah)

Dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19, masyarakat diharuskan mengubah cara hidupnya untuk membatasi aktivitasnya dengan saling menjaga jarak (social distancing), mengurangi berkumpul dan bepergian. Sebagian pembatasan aktivitas masyarakat juga masih diberlakukan pada masa kenormalan baru (new normal) sebagai kewaspadaan dengan kemungkinan terjadinya gelombang kedua (second wave) penyebaran Covid-19. Secara umum pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan menurunnya permintaan/konsumsi yang selanjutnya akan direspon oleh produsen dengan menurunkan suplai barang dan jasa. Penurunan suplai barang dan jasa dilakukan dengan pengurangan produksi menyebabkan pengurangan tenaga

kerja yang berakibat pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Selain melemahnya aktivitas ekonomi baik pada sisi konsumsi maupun produksi, distribusi juga terganggu dengan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga akan menyebabkan meningkatnya masalah-masalah ekonomi yaitu peningkatan pengangguran, penurunan daya beli hingga peningkatan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,52% dan tahun 2019 sebesar 5,58% di atas Jawa Tengah dan Nasional. Akibat Pandemi Covid-19, pertumb ekonomi 2020 Kab Kebumen diperkirakan 0% (lebih baik dari Nasional: -1,7% sd -2,2%; Jateng: -3,93%).

Grafik 2.

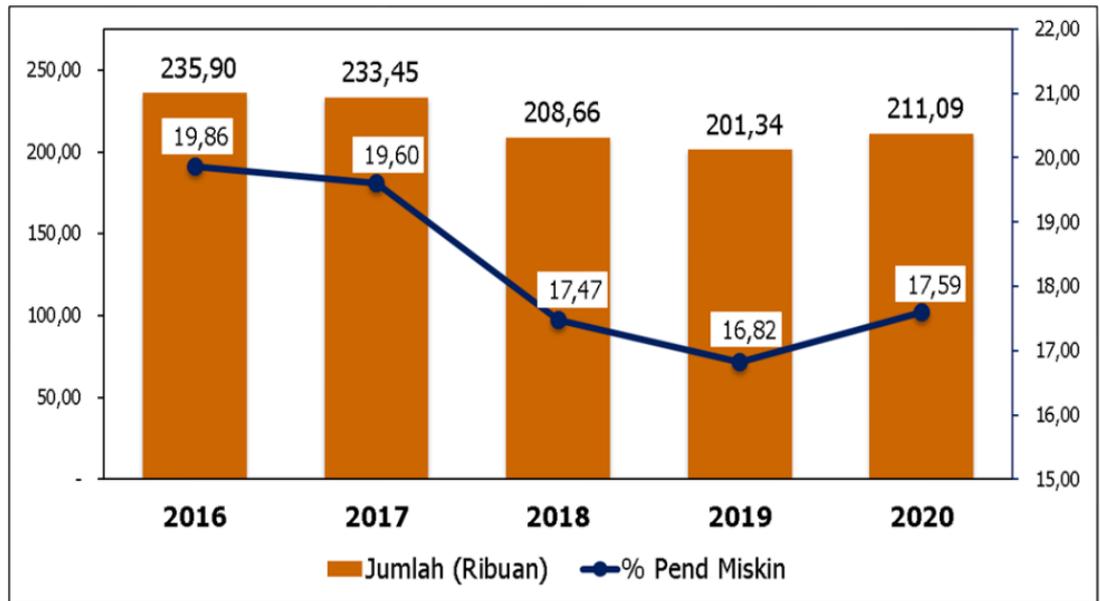
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2021 (data diolah)

Kurun waktu 2016-2019 kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen semakin membaik. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kab Kebumen sebesar 19,86% menurun menjadi 16,82% di tahun 2019 dengan penurunan dari 235.900 jiwa menjadi 201.340 jiwa. Namun tingkat kemiskinan Kab Kebumen meningkat menjadi 17,59% pd tahun 2020 dg penduduk miskin meningkat menjadi 211.090 jiwa. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

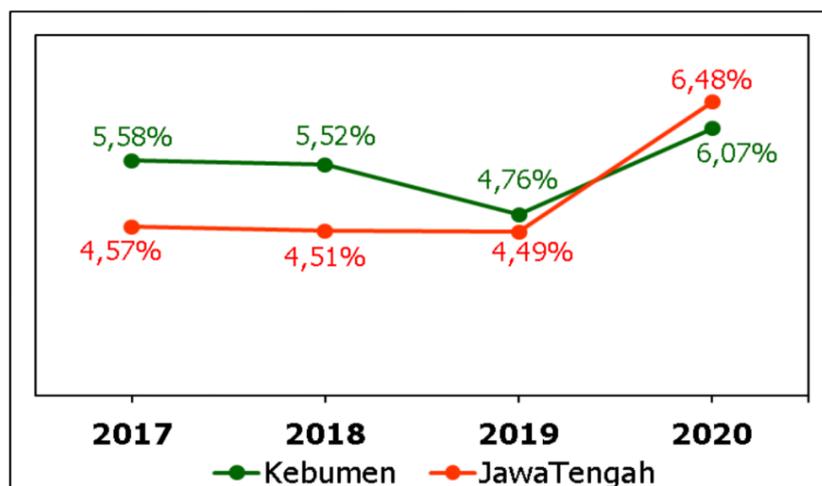
Grafik 3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2021 (data diolah)

Pada periode 2017-2019 tingkat pengangguran menurun dari 5,58% di tahun 2017 menjadi 4,76% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran menjadi 6,07%. Hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 mengakibatkan penghentian aktivitas ekonomi dan PHK tenaga kerja.

Grafik 4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kebumen



Sumber : Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2021 (data diolah)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2. 2

Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Pendidikan					
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	314 lembaga	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	32519 siswa	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	32519 siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	591 orang	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1586	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1002 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	519 orang	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	883 sekolah	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	125001 siswa	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	60725 siswa	Dinas Pendidikan	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	125.001 siswa	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42.329 siswa	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	5.004 orang	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2682 sekolah	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.690 orang	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2449 orang	Dinas Pendidikan	
		10.jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	7293 orang	Dinas Pendidikan	
		11.jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	482 orang	Dinas Pendidikan	
		12.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1214 orang	Dinas Pendidikan	
		13.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	789 orang	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6205 orang	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2342 orang	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	763 orang	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	120 orang	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1076 orang	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	685 orang	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	795	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	107,349	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	42,329	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	107,349	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42,329	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6,530	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1439	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6690	Dinas Pendidikan	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2499	Dinas Pendidikan	
		10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	763	Dinas Pendidikan	
		11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	482	Dinas Pendidikan	
		12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1214	Dinas Pendidikan	
		13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	889	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6205	Dinas Pendidikan	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2342	Dinas Pendidikan	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	763	Dinas Pendidikan	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	120	Dinas Pendidikan	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1076	Dinas Pendidikan	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	685	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	9	Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2166	Dinas Pendidikan	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2166	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	125	Dinas Pendidikan	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	186	Dinas Pendidikan	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	146	Dinas Pendidikan	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	25	Dinas Pendidikan	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	25	Dinas Pendidikan	
Kesehatan					
	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (co :obat-obat)	2001600	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	281297	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	120255	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	376536	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	303794	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	168292	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	529.114	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2388	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1794	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	105	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	111.153	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92	Dinas Kesehatan	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		6. Rencana eknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		6. Rencana eknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	100%	DPU PR	Surat Keterangan Tidak ada Kewenangan Kawasan Sungai

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	100%	Dinas PU PR	Surat Keterangan Tidak menangani irigasi primer
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	73.30%	Dinas PU PR	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	32%	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PU PR	
		3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR	Surat Keterangan
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PU PR	Surat Keterangan
		5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PU PR	Surat Keterangan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2925	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	716	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3641	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	211	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	211	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3641	DISPERKIM LH	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	80,66%	DISPERKIM LH	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	16,46%	DISPERKIM LH	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	508,52%	DISPERKIM LH	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	2925	DISPERKIM LH	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50%	DISPERKIM LH	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	50%	DISPERKIM LH	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	508,52%	DISPERKIM LH	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	56,27%	DISPERKIM LH	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0%	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	177 dok	DPMPSTSP	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Perda 26 2012 tentang Banguna	DPMPSTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Gedung (ada)		
		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	ada	DPMPTSP	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Ada	DISDIK	
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	Tidak ada	DISDIK	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	6174	BPKAD	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	6174	BPKAD	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	960.358 Km	Dinas PU PR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	750 M	Dinas PU PR	
		3. Panjang jembatan yang dibangun	75 M	Dinas PU PR	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	28.21 Km	Dinas PU PR	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	5 Unit	Dinas PU PR	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	28.16 Km	Dinas PU PR	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	12 Unit	Dinas PU PR	
		8. Panjang jalan yang dipelihara	28.16 Km	Dinas PU PR	
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	12 Unit	Dinas PU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	Dinas PU PR/ DISNAKER/BAG. PENGADAAN BRG JASA	Surat Keterangan
Perumahan Rakyat					
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	9	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	9	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	9KK 40JIWA	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	9	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	9	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	9	DISPERKIM LH	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DISPERKIM LH	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	9KK 40JIWA	DISPERKIM LH	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	16,757	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DISPERKIM LH	Surat Keterangan
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	154,62 Ha	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	4633 Unit	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	6,65 Ha	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah di kab/kota	354807 rumah	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit PK RTLH	4633 unit	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	39680 unit	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DISPERKIM LH	
		5. Rasio rumah dan KK	0,847 KK	DISPERKIM LH	
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	20 rumah	DISPERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0	DISPERKIM LH	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	DISPERKIM LH	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	DISPERKIM LH	
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	DISPERKIM LH	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DISPERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DISPERKIM LH	
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DISPERKIM LH	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DISPERKIM LH	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DISPERKIM LH	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	66	Satpol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2324	Satpol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	Satpol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	Satpol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	

No	Urusan Pemerintahan Umum	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenisancaman bencana	36,15%	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBP	
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,07%	BPBP	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,34%	BPBP	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBP	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	Surat Keterangan tidak ada KLB
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam	50%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		penanganan darurat bencana			
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	207	Satpol PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Satpol PP	
		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	Satpol PP	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	Satpol PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	385	Satpol PP	
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	67	Satpol PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	67	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Satpol PP	
Sosial					
.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8	Dinas Sosial	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	16516	Dinas Sosial	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	7366	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5	Dinas Sosial	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	120	Dinas Sosial	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	291	Dinas Sosial	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	120	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	29	Dinas Sosial	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	120	Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	4	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	Dinas Sosial	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	253	Dinas Sosial	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	599	Dinas Sosial	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	27	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	15	Dinas Sosial	
	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	2936	Dinas Sosial	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	74	Dinas Sosial	
	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	Surat Keterangan
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja	Surat Keterangan
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	Surat Keterangan
	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	68,42%	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1,09%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	1749 orang	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Persentase penyerapan lulusan	2,86%	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	13,61%	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0%	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0%	Dinas Tenaga Kerja	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Data tingkat produktivitas total	0%	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	24,64%	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0%	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100%	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	0%	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,46%	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	15	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah perselisihan PHK	5	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	31	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada 15	Dinas Tenaga Kerja	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	3%	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	910	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	14309	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	41	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	267	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	54.35%	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	414	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	0.00%	Dinas Tenaga Kerja	
				Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0,00%	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0,00	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1,16%	Dinas Tenaga Kerja	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	52	DispermadesP3A	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	35	DispermadesP3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	13	DispermadesP3A	
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DispermadesP3A	
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	350	DispermadesP3A	
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DispermadesP3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	29	DispermadesP3A	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40	DispermadesP3A	
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	350	DispermadesP3A	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DispermadesP3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	DispermadesP3A	
		6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	DispermadesP3A	
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DispermadesP3A	
	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	82	Distapang	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	6	Distapang	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Distapang	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	10	Distapang	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Distapang	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	3	Distapang	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	7	Distapang	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	45	Distapang	
Pertanahan					
	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	DPMPTSP	Surat

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket Keterangan
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0%	Bag. Pemerintahan	Surat Keterangan
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0%	Bag. Pemerintahan	Surat Keterangan
	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	DPMPTSP	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	DPMPTSP	
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap:	73,92	DISPERKIMLH	
		a. Indeks kualitas air (IKA)	57,69	DISPERKIMLH	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,75	DISPERKIMLH	
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	70,66	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	ada	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DISPERKIMLH	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2,53%	DISPERKIMLH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	DISPERKIMLH	Tidak ada penetapan
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DISPERKIMLH	Tidak ada kegiatan
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DISPERKIMLH	Surat Keterangan
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	100%		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	100%	DISPENDUKCAPIL	
		2. Penerbitan akta perceraian	100%	DISPENDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	100%	DISPENDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan (berapa jumlah buku yang dicetak profil kependudukan)	2	DISPENDUKCAPIL	
Pemberdayaan Masyarakat					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	22	DISPERMADES P3A	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	22	DISPERMADES P3A	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	85	DISPERMADES P3A	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	49	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1	DISPERMADES P3A	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	1	DISPERMADES P3A	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	3	DISPERMADES P3A	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	19	DISPERMADES P3A	
Pengendalian Penduduk dan KB					
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	0	Dinas Sosial	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	4553	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	267	Dinas Sosial	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	14%	Dinas Sosial	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20	Dinas Sosial	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas Sosial	
		2. Persentase Peserta KBAktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	71,38%	Dinas Sosial	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	20	Dinas Sosial	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	51,22%	Dinas Sosial	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	215	Dinas Sosial	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	146,07%	Dinas Sosial	
Perhubungan					
	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	40%	Dinas Perhubungan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	86%	Dinas Perhubungan	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	70%	Dinas Perhubungan	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	37%	Dinas Perhubungan	
Kominfo					
	Kominfo	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	92%	Dinas Kominfo	
	Kominfo	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	92%	Dinas Kominfo	
	Kominfo	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Dinas Kominfo	
	Kominfo	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100%	Dinas Kominfo	
	Kominfo	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		web yang sesuai standar			
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo	
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Kominfo	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	Dinas Kominfo	
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	30,19%	Dinas Kominfo	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo	
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	57%	Dinas Kominfo	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	28%	Dinas Kominfo	
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		14. Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Kominfo	
	Kominfo	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi	100%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas Kominfo	
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Kominfo	
Koperasi Usaha Kecil Menengah					
	KUKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	52%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0,86%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,60%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2,58%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	76,80%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,58%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45,10%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,8%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
	KUKM	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,79%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,12%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,64%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		5. Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,22%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
		6. Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,22%	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data dan UMK	Ket
		pemasaran			
		7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	2,06%	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	8 fasilitas	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	Surat Keterangan
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 kali	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	2 kali	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 kali	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2921 orang	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8360 dok	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	3,8864428552 0	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	28 orang	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	135 perusahaan	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	2	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	47	DINAS PARIWISATA	Data terlampir
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	5	DINAS PARIWISATA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	DINAS PARIWISATA	Surat Keterangan
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	DINAS PARIWISATA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	177 orang	DINAS PARIWISATA	
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1 keg	DINAS PARIWISATA	
Statistik					
	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	DINAS KOMINFO	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Surat Keterangan
Persandian					
	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	DINAS KOMINFO	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	DINAS KOMINFO	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%	DINAS KOMINFO	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan	31	DINAS PENDIDIKAN	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		publikasi)			
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	31	DINAS PENDIDIKAN	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	31	DINAS PENDIDIKAN	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	83	DINAS PENDIDIKAN	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	91	DINAS PENDIDIKAN	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1	DINAS PENDIDIKAN	
		7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DINAS PENDIDIKAN	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	DINAS PENDIDIKAN	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	DINAS PENDIDIKAN	
	Kebudayaan	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DINAS PENDIDIKAN	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	DINAS PENDIDIKAN	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	DINAS PENDIDIKAN	
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	83	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	83	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Kebumen tidak memiliki museum
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	92.68%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	4.24%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.05%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3.44%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	0	Dinas Kearsipan dan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Perpustakaan	
Kearsipan					
	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2.65%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan					
	Kelautan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	5034	dinas kelautan	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	dinas kelautan	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	6	dinas kelautan	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	180	dinas kelautan	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	36.82	dinas kelautan	
Pariwisata					
	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	117	Dinas Pariwisata	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	117	Dinas Pariwisata	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	20	Dinas Pariwisata	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	68	Dinas Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dinas Pariwisata	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	5	Dinas Pariwisata	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	12,13%	Dinas Pariwisata	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	51	Dinas Pariwisata	
Pertanian					
	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	181	Dinas Pertanian	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	309	Dinas Pertanian	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	24	Dinas Pertanian	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	309	Dinas Pertanian	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	75%	Dinas Pertanian	
	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular)	35%	Dinas Pertanian	
				Dinas Pertanian	
Energi Sumber Daya Mineral					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah	0%	DPMPTSP	
Perdagangan					
	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100%	Disperindag	
		2. Persentase penerbitan TDG	100%	Disperindag	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	Disperindag	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		Disperindag	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	100%	Disperindag	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0%	Disperindag	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0%	Disperindag	
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	Disperindag	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0%	Disperindag	
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Disperindag		
	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,4%	Disperindag		
	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	97%	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perdagangan	1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	37%	Disperindag	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0%	Disperindag	
Perindustrian					
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	0%	Disperindag	Tidak ada kawasan industri
	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	Disperindag	
	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Disperindag	
	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	0,01%	Disperindag	
	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	tdk ada kawasan transmigrasi
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	tdk ada kawasan transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Dinas Tenaga Kerja dan UMK	tdk ada kawasan transmigrasi
	Perencanaan dan Keuangan	Tidak ada Ikk Output			
	Pengadaan	Tidak ada Ikk Output			
	Kepegawaian	Tidak ada Ikk Output			
	Manajemen Keuangan	Tidak ada Ikk Output			
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Tidak ada Ikk Output			

Sumber : data diolah

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2. 3

Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,34%	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,49%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	76,21%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,52%	Dinas Pendidikan	
Kesehatan					
	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,11%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,07%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,42%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66,26%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	46%	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,69%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,12%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,08%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,14%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	43,53%	Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,58%	Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas PUPR	Tidak ada WS kewenangan kabupaten
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai (Pemecah Ombak) di WS Kewenangan Kab/Kota	-	Dinas PUPR	Tidak ada WS kewenangan kabupaten
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	Dinas PUPR	Tidak menangani irigasi primer

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	12,68%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,71%	DISPERKIM LH	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas PUPR/DPMPTSP	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	73.16%	Dinas PUPR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	Dinas PUPR/disnaker	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Bagian Pembangunan	
Perumahan Rakyat					
	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PERKIM LH	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas PERKIM LH	Tidak ada keg relokasi prog pemerintah
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	4,30%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,18%	Dinas PERKIM LH	
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	Dinas PERKIM LH	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	22,73%	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	249.334	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	53.450	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	64	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	Satpol PP	
Sosial					
	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	44,60%	Dinas Sosial	
	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	13,61%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	111.6430 %	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	24,64%	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,99%	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15,89%	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,21%	DISPERMADES P3A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,12%	DISPERMADES P3A	
Pangan					
	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	190,17%	Dinas Pertanian	
Pertanahan					
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPMPTSP	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	14,14%	DISDIK, DPU, DINKES, DISPORAWISATA	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	BAP3DA/ DPMPTSP	
	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	BAG. PEMERINTAHAN	Surat Keterangan
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100%	DPMPTSP/BPN	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	BAG. PEMERINTAHAN/BPN	Surat Keterangan
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,92	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	58,73%	DISPERKIMLH	
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	20%	DISPERKIMLH	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,22%	DISPENDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	31,21%	DISPENDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	90,36%	DISPENDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	DISPENDUKCAPIL	
Pemberdayaan Masyarakat					
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	120%	Dispermades P3A	
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	2,59%%	Dispermades P3A	
Keluarga Berencana					
	Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,3%	Dinas Sosial	
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,46%	Dinas Sosial	
	Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	26,67%	Dinas Sosial	
Perhubungan					
	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	71,74 %	Dinas Perhubungan	
	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,40	Dinas Perhubungan	
Kominfo					
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	92,19%	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	33,33%	Diskominfo	
	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	82,79%	Diskominfo	
Koperasi Usaha Kecil Menengah					
	KUKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	56,96%	Disnaker UMKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	Disnaker UMKM	
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	-56,21%	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01%	Dinas Pariwisata	
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,01%	Dinas Pariwisata	
	Pemuda dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	19	Dinas Pariwisata	
Statistik					
	statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Kominfo	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	51,65%	Dinas Pendidikan	
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	43,08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Surat keterangan
Kearsipan					
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76,02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	6.666.666.667	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan					
	Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	12207.85	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Pariwisata					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	58,95%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	29,18%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	21,59%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,63%	Dinas Pariwisata	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3378006261	Dinas Pariwisata	
Energi Sumber Daya Mineral					
	ESDM	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin diKabupaten/Kota	0%	DPMPTSP	tdk ada perusahaan
Pertanian					
	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,08 ton	Dinas Pertanian	
	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	26,12%	Dinas Pertanian	
Perdagangan					
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	8,20%	DISPERINDAG	
	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	96,17%	DISPERINDAG	
	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	37,29%	DISPERINDAG	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perindustrian					
	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0.01%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0%	DISPERINDAG	
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (rumus adalah Keterkinian informasi industri + kelengkapan informasi industri) liat juknis	100%	DISPERINDAG	
	Transmigrasi	Tidak ada IKK Outcome			

Sumber : data diolah

c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 4

Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pengadaan					
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	35,86%	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	64,75%	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian					
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	427,38%	BKPPD	
	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,97%	BKPPD	
	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	BKPPD	

Manajemen Keuangan					
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-100%	BPKAD	
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-3,33%	BAPPENDA	
	Manajemen Keuangan	Assets Management	Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
			Ya	BPKAD	
	Manajemen Keuangan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7.21%	BPKAD	
Transparansi dan Partisipasi Publik					
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DISKOMINFO	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83%	DISKOMINFO	

Sumber data : data diolah

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU Kabupaten Kebumen) sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut sekaligus.

Tabel 2. 5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No .	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,04	13,34	102,3%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,54	105,31%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	61,47	66,6	108,43%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	24	23,5	97,92%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,97	73,40	100,58 %
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	75	76,73/ 100.000 KH	97,69%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,75	6,9/ 1000 KH	135,81%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	35,13	33,36%	94,96%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hokum	Kasupra sarans	600	60 kasus	190%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	1-3	-1,7	-170%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	13.890,0	22.878,99	165%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,22	0,21	104,55%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	5	5 Unit	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	1	-56,21	-56,21%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15-16	-70,82%	-443%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	61,88	77,66	126%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,00	74,22	98%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18-19	17,59	102,28%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	4-5	6,07%	78,6%
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	82,73	85,29	103,09%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	96	100%	104,17%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	B (3,3226)	110,75%
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B 61,85	103,08%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP atas LKPD 2019	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	79,2	98,75%
Rata-Rata						71,46%

Sumber data : Bagian Organisasi Tahun 2020

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. diketahui bahwa 14 (empat belas) indikator sasaran atau 58,85% pencapaiannya dengan kriteria Sangat Baik, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 34,62% pencapaiannya dengan kriteria Baik, dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,54% pencapaian dengan kriteria Kurang Baik, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja 71,46% atau bermakna Cukup Baik. Jadi rata-rata capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 (71,46%) lebih rendah dari pada rata-rata capain kinerja pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 (156,85) dan Tahun 2018 (136,69), faktor utama yang mempengaruhi kinerja tahun 2020 yang menurun adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Perbandingan kinerja tahun 2019 dengan 2020 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 6
Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja	
				2019	2020
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,91	102,3%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	105,31%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	63,59	108,43%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	94,37	97,92%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	100,58 %
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	45,86	97,69%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	6,93	135,81%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagama-an	%	32,61	94,96%
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasuprasarans	634	190%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	5,73	-170%
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	23.156,71	165%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,22	104,55%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawasan	4	100%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	81,88	-56,21%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	44,86	-443%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	74,33	126%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja	
				2019	2020
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	75,89	98%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	16,82	102,28%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	5,52	78,6%
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	82,74	103,09%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	100	104,17%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	A	110,75%
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	103,08%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	70	98,75%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d. 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 5.

Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017-2020 Kabupaten Kebumen



Sumber Data : Pengolahan LKjIP Pemkab Kebumen Tahun 2020

Dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata capaian kinerja Baik. Namun demikian, terdapat 9 (sembilan) indikator yang belum mencapai target yaitu :

1. Capaian prestasi pemuda dan olahraga
2. Angka Kematian Ibu
3. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan
4. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan); dan
5. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN
6. Persentase peningkatan kunjungan wisata
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Angka Pengangguran.
9. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kebumen, maka capaian kinerja tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020 Terhadap RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,04	13,34	102,3%	13,20	101,06%
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,16	7,54	105,31%	7,20	104,72%
2.	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	61,47	66,6	108,43%	63,39	105,14%
3.	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	24	23,5	97,92%	65,38	35,94%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,97	73,40	100,58 %	73,01	100,53 %
		6. Angka Kematian Ibu	Rasio	75	76,73/ 100.000 KH	97,69%	68/ 100.000 KH	87,16%
		7. Angka Kematian Bayi	Rasio	10,75	6,9/ 1000 KH	135,81%	10,5	134,29%
5.	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100%	100%	100%	100%
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus	%	35,13	33,36%	94,96%	37,65%	88,61%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
		Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan						
6.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasprasan s	600	60 kasus	190%	500 kasus	188%
7.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbu-han ekonomi	%	1-3	-1,7	-170%	6	-28 %
		12. Pendapatan perkapita penduduk	Rp.000	13.890,0	22.878,99	165%	25.179,48	91%
		13. Rasio/ Indeks Gini	Rasio	0,22	0,21	104,55%	0,21	100%
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Kawas an	5	5 Unit	100%	6 Unit	83,33%
8.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	1	-56,21	-56,21%	6	-93,7%
9.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	15-16	-70,82%	-443%	19,69	-360%
10.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	61,88	77,66	126%	62,88	125,52%
11.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	76,00	74,22	98%	77,5	96%
12.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	18-19	17,59	102,28%	15,45	86,15%
13.	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	4-5	6,07%	78,6%	1,97%	-108,12

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
14.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	82,73	85,29	103,09%	83,87%	101,69%
15.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	96	100%	104,17%	96%	104,17%
16.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B (3)	B (3,3226)	110,75%	B 3	110,75
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	B	B 61,85	103,08%	B 60	103,08%
		25. Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP atas LKPD 2019	100%	WTP	100%
17.	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	80,00	79,2	98,75%	80%	98,75%
Rata-Rata						71,46%		73,71%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kebumen, 2020

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada sasaran ini pencapaian nilai sasaran sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 atau capaian kinerja 102,3% kategori **Sangat Baik**, dengan kondisi target Angka Harapan lama sekolah tahun 2020 adalah 13,04 tahun dan realisasi capaian 13,34 tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi angka harapan lama sekolah tahun 2020 lebih tinggi yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I. Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2020 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten kebumen yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Pada indikator sasaran ini pencapaian nilai rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 105,31% atau bermakna **Sangat Baik**. Rata-rata Lama sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,54 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,17 tahun. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan), Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) sesuai dengan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2020. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif.

3. Prosentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Pada indikator sasaran ini realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 atau capaian kinerja 108,43% atau dengan kriteria **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan realisasi Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan.

Berdasarkan perhitungan rumus indikator Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2019 sudah memenuhi target. Pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan di dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam pencapaian target Persentase Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

Faktor pendukung **keberhasilan** dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja institusi pemerintahan, diharapkan pada akhir tahun RPJMD dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga

Pada indikator sasaran ini dari target yang ditetapkan sebesar 24 dengan realisasi sebesar 23,5 atau capaian kinerja 97,92 % dengan kriteria **Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada penurunan realisasi Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target adalah adanya pandemi virus Covid19, mengakibatkan event-event olahraga ditiadakan. Solusi atau

upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah meningkatkan pelatihan agar prestasi tetap dapat diperoleh.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun **hambatan** dalam pencapaian target antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga untuk berlatih dan anggaran.

Untuk meningkatkan pengembangan pada bidang kepemudaan dan olahraga memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Hal ini terkait dengan sarana dan fasilitas-fasilitas untuk berlatih yang memadai dan juga kesejahteraan para atlet. Pemberian tali asih kepada atlet perlu ditingkatkan nilainya, dikandung maksud untuk meningkatkan semangat atlet dalam bertanding. Peningkatan jumlah anggaran untuk bidang kepemudaan dan olahraga sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian prestasi pemuda dan olahraga. Anggaran sebagian besar adalah sisa tender/efisiensi.

5. Angka Harapan Hidup

Pada indikator sasaran angka harapan hidup dari target yang ditetapkan sebesar 72,97 dengan realisasi sebesar 73,40 atau capaian kinerja sebesar 100,58% dengan kriteria **Sangat Baik**. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Kebumen telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 0,53 tahun. Pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen 72.87 tahun dan pada tahun 2020 Angka Harap Hidup 73,40 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 maka capaian kinerja tahun 2020 adalah 100,53 %.

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan di Indonesia berdampak pada Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia yang ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan

gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, keterbatasan pemenuhan sarpras dan alkes untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.

Solusi untuk mempertahankan target akhir RPJMD yang bisa dilakukan dan perencanaan kedepan antara lain : mengutamakan upaya promotif, preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM, pemahaman perencanaan dalam penterjemahan pola pelayanan kesehatan, pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah geografis, pemahaman pelaksana maupun stakeholder bahwa pelayanan primer bukan merupakan pelayanan kuratif, memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukan.

Pada tahun 2020 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 66.653.590.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.724.356.359- (83.60%) Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 16,40 % karena selisih

adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

6. Angka Kematian Ibu

Pada indikator sasaran angka kematian ibu dari target yang ditetapkan sebesar 75/100.000 KH dengan realisasi sebesar 76/100.000 KH atau capaian kinerja 97,69% dengan kriteria **Baik**. Pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen Angka Kematian Ibu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini salah satunya karena adanya pandemi Covid berdampak pada penurunan kesehatan Ibu Hamil. Adapun dari jenis kematian Ibu di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, meninggal dalam keadaan hamil 1 orang, keadaan bersalin 3 orang dan ibu nifas 11 orang. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia 20-34 tahun sebesar 9 orang, kemudian pada kelompok umur ≥ 35 tahun sebanyak 4 orang dan pada kelompok umur ≤ 20 tahun sebanyak 2 orang. Dari total kematian Ibu (maternal) sebanyak 15 kasus terbanyak dikarenakan hipertensi pada kehamilan sebanyak 6 orang, karena perdarahan 5 orang dan karena penyebab lain 4 orang (2 orang karena terkonfirmasi Covid, 1 orang dengan penyakit jantung dan 1 orang karena Emboli air ketuban)

Keberhasilan upaya kesehatan ibu didukung oleh program : (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan ibu nifas, (4) pelayanan komplikasi kebidanan dan (5) pelayanan kontrasepsi. Adapun **kendala/hambatan** antara lain masih kurangnya catatan yang baik dari data ibu hamil kehamilan resti ataupun faktor resiko, belum diadakannya evaluasi secara mendalam mengenai angka kematian ibu dan komplikasi dalam kehamilan, pelaksanaan jejaring rujukan kurang optimal.

Upaya mempertahankan realisasi indikator kinerja angka kematian ibu antara lain terus meningkatkan Upaya program kerja tentang kesehatan ibu (upaya promotif, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, Pemberdayaan Keluarga Berencana), Peningkatan antenatal yang berkualitas (mampu mendeteksi dan menangani kasus resiko tinggi secara memadai), pelayanan pasca persalinan/kelahiran yang aman, meningkatkan pelayanan

keawatdaruratan obstetri yang komprehensif mudah dijangkau serta meningkatkan jejaring rujukan Puskesmas PONED ke RS PONEK.

Pada tahun 2020 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 67.823.543.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.354.258.309 (74,24%), Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan. Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 25,7 % karena adanya pandemi *Covid-19* namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

7. Angka Kematian Bayi

Selama periode 2016 hingga 2020 di Kabupaten Kebumen ada kenaikan dan penurunan Angka Kematian Bayi, namun demikian pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Kematian Bayi tahun 2020 ditargetkan 10,75/1000 KH, terealisasi 6,9/1.000 KH atau capaian kinerja 135,81% kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan percepatan penurunan kematian Bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal peran serta terutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan.

Pada tahun 2020 indikator Angka Kematian Bayi didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 67.823.543.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.354.258.309 (74,24%), Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan.

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 25,7 % karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

8. Angka Melek huruf Al Quran Siswa Lulus

Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah beragama islam (JSLs-Is) dikalikan seratus persen.

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran.

Upaya untuk meningkatkan Capaian angka Melek Huruf Al-Quran antara lain dengan Penyelenggaraan pesantren kilat, tambahan pelajaran agama melalui penyelenggaraan TPQ di sekolah.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Prosentase Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah telah mencapai 100%. Upaya keberhasilan dalam mencapai target akhir RPJMD adalah dengan tetap menjaga kinerja pada program dan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 indikator Angka Angka Melek huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah didukung oleh program.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Indikator kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diperoleh dari rumus perhitungan Capaian Penurunan (Rehabilitasi Kasus Narkoba tahun $n+$ Penemuan Kasus Baru HIV tahun n + Kasus Pertikaian Agama tahun n)

Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diartikan bahwa kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerjanya. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan tahun 2020 dapat belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 94,96 % atau masuk pada kriteria capaian kinerja **Baik**.

Kendala atau hambatan dalam mencapai realisasi kinerja Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan diantaranya selesainya dukungan dari global fund dalam penanggulangan AIDS, Desa belum menganggarkan program WPA melalui APBDes, Program HIV AIDS tidak dilaksanakan secara berkesinambungan, dan Pemberian pengetahuan HIV-AIDS kepada masyarakat belum menyeluruh.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif yaitu : menyelenggarakan Bimbingan teknis tentang HIV-AIDS pada guru Bimbingan konseling dan penyuluh agama, sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan remaja, Pelatihan kepada pendamping ODHA, pelatihan tentang kesehatan pada OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA), penyusunan buku panduan Warga Peduli AIDS (WPA), Sosialisasi buku panduan WPA kepada pendamping Desa, pemberian bantuan dan pelatihan kepada ODHA, program pencegahan HIV AIDS melalui transmisi seksual pada hotspot, pelatihan pengorganisasian Warga Peduli AIDS dan Komunikasi yang intensif antar Kementerian Agama, FKUB, MUI dan Kepolisian.

10. Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 190% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Rincian capaian penegakan perda dan perkara tahun 2019 sebagai berikut :

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2020 bukan berarti tidak ada **kendala atau hambatan**, kendala yang ada antara lain masih belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran perda, pemberdayaan peran Satlinmas dan kader siaga trantib belum optimal dalam kegiatan yang menunjang pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target adalah melakukan upaya peningkatan intensitas kegiatan di masyarakat baik upaya preventive dan represif. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 yaitu :

- a. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
- b. Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas
- c. Penyiapan tenaga pengendali kemandirian dan kenyamanan lingkungan
- d. Pengendalian keamanan lingkungan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
- g. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- h. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- i. Penegakan Peraturan Daerah
- j. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- k. Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum.

Pada masa pandemic *covid-19* telah melakukan tindakan penegakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 mulai Bulan Maret 2020 pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan sampai dengan Desember 2020 operasi yang dilaksanakan mencapai 2.120 titik.

11. Pertumbuhan Ekonomi (Atas Dasar Harga Konstan)

Indikator ini ditargetkan sebesar 1-3% pada Tahun 2020, dengan realisasi kinerja sebesar -1,7% sehingga capaian -170% atau kriteria capaian **Kurang**.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1-3% pada Tahun 2020, dan terealisasi sebesar -1,7% sehingga tingkat capaiannya adalah -170%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19, yang memberlakukan aturan pembatasan di semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Pergerakan ekonomi yang terbatas menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa di tingkat lokal, regional serta nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan dengan *refocusing* anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi antara lain bantuan bahan usaha untuk pelaku usaha mikro, bantuan subsidi Bunga, padat karya tunai dan peningkatan ketahanan pangan. Diharapkan program ini dapat membangkitkan perekonomian daerah yang mengalami keterpurukan, yang selanjutnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

12. Pendapatan per Kapita Penduduk

Capaian kinerja indikator pendapatan perkapita penduduk telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 165 % dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mencapai Rp 23.156.270,- pada Tahun 2019, diperkirakan menurun karena adanya pandemic covid-19 dengan target pada Tahun 2020 menjadi Rp.13.890.000,- dan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp 22.878.990,-.

13. Rasio/Indeks Gini

Capaian kinerja indikator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 104,5% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 mencapai 0,21 yang jauh lebih rendah dari tingkat ketimpangan di level nasional yang mencapai skor 0,39. Capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak berimbas kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. **Upaya** yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menyasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya Kawasan Pembangunan Ekonomi

Target dari Indikator terbangunnya kawasan industri merupakan target yang menunjukkan progress, karena pada tahun 2020 sudah terbangun 5 (lima) kawasan pedesaan sehingga capaian Kinerja 100% atau kriteria capaian **Baik**. Kawasan pedesaan dibentuk sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Kebumen

berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan).

Tujuan pembentukan kawasan pedesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri) yaitu :

- a. Kawasan pantai pesisir, terdiri dari Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Desa Pasir, Sрати, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo Kecamatan Ayah;
- b. Kawasan anyaman pandan, terdiri dari Desa Grenggeng, Wonorejo, Pohkumban Kecamatan Karanganyar, Desa Karanggayam, Penimbun, Kecamatan Karanggayam;
- c. Kawasan batik, terdiri dari Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen;
- d. Kawasan peternakan sapi terpadu, terdiri dari Desa Tanggulangin dan Jogosimo Kecamatan Klirong; dan
- e. Kawasan gula semut, terdiri dari Desa Jladri, Wonodadi, Rangkah, Geblug, Pakuran Kecamatan Buayan.

Pendampingan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada Tahun 2020 mendapat anggaran sebesar Rp.205.000.000,-, antara lain rencananya akan digunakan untuk Pembuatan Vidio Provil (4 Kawasan) dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,-Iklan atau Publikasi di TV Lokal Kebumen (sebanyak 5 acara) dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000,-, penyelenggaraan Lounching Kawasan serta mengikuti Pameran Dalam Daerah dalam upaya untuk mensosialisasikan Kawasan Pedesaan kepada masyarakat. Selain hal tersebut anggaran juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Keuangan Kawasan Pedesaan, Pelatihan bagi Pendamping Kawasan, Pelatihan BUMDESMA dan BKAD, pendampingan, pembinaan serta evaluasi Kawasan.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Jumlah anggaran semula pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp. 205.000.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp. 14.496.000,-

Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah fasilitasi bantuan keuangan kawasan perdesaan untuk 22 desa penyangga kawasan sebesar Rp.1.000.000.000,- sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan antara lain digunakan untuk pembelian produk dari petani gula semut, pembelian complong pandan dari pengrajin, pembelian dan pengembangan sapi, pengembangan produk batik printing serta pengembangan sarana dan prasarana wisata desa. Begitu juga dengan peran OPD terkait atau OPD yang menjadi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP), belum dapat memberikan kontribusi sesuai program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan kawasan perdesaan.

Selanjutnya pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan sebesar Rp.101.040.000,- antara lain direncanakan untuk pendampingan dan evaluasi kawasan termasuk fasilitasi bantuan keuangan sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyusunan dan sosialisasi Perbup Kawasan, Perbup RPKP, Perencanaan BUMDESMA Kawasan Perdesaan serta pembuatan Video Provil Kawasan Perdesaan.

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 telah ditetapkan bahwa target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan investasi PMA/PMDN adalah naik sebesar 1% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 887.522.601.767,-. Dari tabel diatas memperlihatkan angka realisasi Tahun 2020 mencapai Rp.

388.644.285.520 atau dengan kata lain memperlihatkan realisasi -56,21% atau capaian kinerja -56,21% dengan kriteria capaian kinerja **Kurang**. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi kinerja pada tahun 2020 lebih rendah.

Adapun kurang tercapainya target Investasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020 disebabkan oleh:

1. Dampak kondisi pandemi Covid-19;
2. Adanya refocusing anggaran;
3. Menurunnya kepedulian investasi di Kabupaten Kebumen;
4. Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

Peran nyata/ upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kebumen antar lain:

1. Perbaikan pelayanan publik dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP);
2. Pelaksanaan kegiatan promosi secara virtual;
3. Pelaksanaan kegiatan temu usaha secara virtual;
4. Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Adapun hambatan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan izin dimasa pandemi covid-19;
2. Kurang efektifnya pelaksanaan pengendalian penanaman modal secara daring.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah:

1. Peningkatan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Peningkatan promosi investasi melalui event dan forum kerjasama investasi;
3. Optimalisasi penyusunan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi;
4. Pengembangan perencanaan investai melalui kajian/peta potensi investasi.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2020:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara daring/virtual;
2. Melaksanakan kegiatan promosi investasi secara daring/virtual

Kurang efisien, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Secara anggaran terjadi rasionalisasi sebesar 80% pada semua program kegiatan;
2. Kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara daring dan pengurangan volume.

16. Persentase peningkatan kunjungan wisata

Berdasarkan data realisasi kunjungan wisata dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Presentase peningkatan kunjungan wisata sebesar -443% atau kriteria capaian kinerja **Kurang**.

Pada tahun 2015 data kunjungan yang dihitung hanya dari kunjungan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2016 sampai sekarang data kunjungan diambil dari obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan yang bukan dikelola Pemerintah Daerah (swasta/desa-desa wisata). Dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan secara fluktuatif per tahunnya, mulai tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan obyek wisata yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah. **Wujud intervensi** tersebut dengan melakukan pembinaan manajemen pengelolaan kepada kelompok sadar wisata/stakeholder pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berusaha membantu masyarakat membangun wisata mandiri yakni dalam bentuk pembinaan dan pengembangan obyek wisata rintisan yang akan dibangun oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha menciptakan *multiplier effect* dari usaha pariwisata yang dibangun masyarakat dengan tujuan agar pengunjung datang kembali ke Kabupaten Kebumen sehubungan banyaknya obyek wisata pilihan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi Persentase peningkatan kunjungan wisata tahun 2020 lebih rendah hal ini dikarenakan adanya pandemi *virus covid-19* sehingga Pemerintah Daerah menutup kegiatan atau aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa diantaranya penutupan obyek wisata.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata menjadi -443%. Solusi atau

upaya untuk mencapai target adalah untuk tahun 2020 masih mengikuti aturan Pemerintah terkait dengan upaya pencegahan Covid19.

17. Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Adapun realisasi dan capaian kinerja disimpulkan bahwa dari target 61,88% di tahun 2020 berhasil realisasi sebesar 76,66% sehingga capaian presentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sebesar 126% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Adapun uraian dari masing-masing indikator pendukung sebagai berikut :

a. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen yang baru adalah 960,358 kilometer sedangkan jalan dalam kondisi mantap tahun 2020 adalah sebesar 702,591 kilometer atau capaian sebesar **73,16 %**.

b. Ketersediaan jaringan Irigasi

Pada Tahun Tahun 2020 jumlah luasan jaringan dalam kondisi baik sebesar 8.986,06 Ha, Sedangkan Total luasan jaringan irigasi sebesar 12.260 Ha, atau capaian kinerja sebesar **73,30 %**.

Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya lebih **tinggi** namun capaian tersebut masih di bawah target yang direncanakan hal ini disebabkan oleh masih banyak saluran dan bendungan yang mengalami kerusakan.

c. Cakupan Air bersih yang digunakan oleh rumah tangga sejumlah 301.580 sambungan rumah dengan jumlah seluruh rumah tangga 454.165 rumah tangga atau capaian kinerja sebesar **86,53 %**. keberhasilan indikator ini didukung oleh ketersediaan sumber mata air dan pengelola (kelompok pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara

lain :

1. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan
2. Terencananya program dan kegiatan rutin maupun berkala dapat berjalan dengan sesuai rencana

3. Tersusunnya atau tersedianya dokumen teknis kePUan
4. Kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencukupi.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target:

1. Progres pengambilan termin oleh pihak penyedia jasa tidak dilakukan segera setelah pekerjaan fisik selesai, namun pengambilannya di akhir tahun anggaran, sehingga pengambilan termin menumpuk pada akhir tahun dan membuat realisasi fisik dan keuangan tidak seimbang
2. Beberapa kondisi di lapangan tidak dapat diprediksi seperti faktor cuaca dan bencana alam, sehingga dapat menghambat waktu pelaksanaan pekerjaan dan bisa membuat pekerjaan tidak dapat selesai sesuai jadwal
3. Beberapa penyedia tidak mengambil uang muka dan termin sesuai progres, sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai target
4. Perlu adanya waktu tambahan untuk menunggu hasil uji tes laboratorium
5. Jumlah SDM yang terbatas, sehingga apabila pekerjaan selesai di waktu yang bersamaan akan terjadi kekurangan personil dan memeriksa hasil pekerjaan

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah telah mencapai 88,10 %. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :

1. Menyarankan kepada penyedia jasa agar segera mengajukan termin sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga anggaran bisa segera terserap sesuai jadwal anggaran kas
2. Lelang dilakukan di awal tahun
3. Diusahakan tidak ada anggaran perubahan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memberikan diklat teknis, sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan

5. Adanya dukungan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Kebumen, sehingga dapat mencukupi target pada masing-masing program kegiatan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi supaya pekerjaan dapat sesuai jadwal pekerjaan
7. Menyusun jadwal pemeriksaan pekerjaan
8. Hasil pekerjaan segera dilakukan uji di laboratorium, supaya tidak terjadi keterlambatan

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dari target IKLH yang ditetapkan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebesar 76, realisasi mencapai 74,22 dengan prosentase capaian sebesar 98 % atau kategori capaian kinerja **Baik**.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas / lebih besar dari pada capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan dengan capaian IKLH secara Nasional, pada tahun 2016 angkanya lebih rendah, tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2020 antara lain melalui kegiatan :

1. Sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik
2. Adanya demplot / percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran
3. Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha / kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau **Hambatan dan tantangan** yang dihadapi dalam mencapai target IKLH antara lain : Adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup; Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan.

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :

1. Sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen;
2. Penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah;
3. Melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” ;
4. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
6. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan;

Pada tahun 2020 indikator ini didukung oleh Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan program peningkatan pengendalian polusi, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.312.709.000 dan realisasi Rp. 3.206.044.221,- (96,78%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 3,22% merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

19. Angka Kemiskinan

Capaian kinerja untuk angka kemiskinan tahun 2020 sebagaimana tabel diatas mencapai 102,28% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**, hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menurunkan angka kemiskinan telah berhasil dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020.

Selama kurun 2015-2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dari 20,44% menjadi 17,59%. Pada tahun 2015-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen masih berada di atas nasional dan provinsi. Secara umum, pencapaian angka kemiskinan tahun 2019 sudah mampu mencapai target RPJMD Kabupaten Kebumen, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 15,45% membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholders melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah, persentase penduduk miskin turun dari 13,58% pada tahun 2019 menjadi 11,41% pada tahun 2020. Sedangkan ditingkat nasional persentase penduduk miskin turun dari 9,41% pada tahun 2019 menjadi 9,78% pada tahun 2020. Angka kemiskinan naik baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional hal ini dikarenakan dampak adanya pandemi covid-19.

Adapun prioritas untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
2. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;
4. Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan
6. Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.
7. pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, petani dan kegiatan ekonomi lainnya .

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, beberapa hal yang telah yang telah disusun sebagai **upaya-upaya** terobosan, antara lain :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan.
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun2015.
3. Pembentukan Kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk

melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/412/KEP/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen yang telah dirubah sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/249 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen. Keputusan tersebut telah diganti dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/123 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen;

20. Angka pengangguran

Pada tahun 2020 angka pengangguran di Kabupaten Kebumen ditargetkan mencapai 4-5%, namun terealisasi 6,07% atau tidak mencapai target yang diharapkan dengan capaian kinerja 78,6% atau kategori **Baik**.

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2020 antara lain:

1. Mengurangi efek pengangguran terbuka dengan mengadakan kegiatan padat karya yang memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur;
2. Memberikan bantuan UMKM bagi yang terdampak covid 19, sehingga dapat bertahan di masa pandemic dan diharapkan dapat tumbuh dan menjadi umkm naik kelas membuka lapangan kerja;
3. Memfasilitasi pengantar kerja dalam dan luar negeri dimana kantong-kantong penerimaan tenaga kerja masih banyak yang diluar daerah dan luar negeri;
4. Memberikan pelatihan eks imigran sehingga memiliki ketrampilan wirausaha baru, diharapkan dengan itu mereka dan berusaha dan membuka lapangan kerja dan tidak kembali menjadi pekerja imigran.

Permasalahan yang menjadi penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja antara lain: rendahnya kualitas/kompetensi tenaga kerja; rendahnya Keterserapan tenaga Kerja, perusahaan masih belum sepenuhnya melaporkan data ketenagakerjaan dan sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran.

Solusi untuk mengatasi mengatasi permasalahan yang ada adalah mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme antar kerja antar daerah, mengupayakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri khususnya di sektor formal, meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.

21. Persentase Gedung Sekolah dalam Kondisi Baik

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 103,09% atau kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan sebesar 2,75%. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Provinsi, dan Pusat mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2020, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 44 sekolah, rehab gedung SMP/MTs di 12 sekolah dan rehab 7 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

Apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator Presentase gedung sekolah dalam kondisi baik telah mencapai 101,69%. **Solusi atau upaya** untuk mencapai target akhir RPJMD adalah mempersiapkan perencanaan dan data awal terhadap kebutuhan sarana prasarana sekolah dan kebutuhan kantor serta terhadap perencanaan proses pengadaan pada tahun berikutnya, sehingga target yang diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.

22. Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan

Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kesehatan. Tahun 2020 target indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan sebesar 96% dan realisasi sebesar 100% atau capaian kinerja 104,71% dengan kriteria capaian kinerja **Sangat Baik**.

Realisasi Indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan pada tahun 2020 mencapai 100% atau tingkat capaian kinerja

104,71% kategori **Sangat Baik**, hal ini tidak lain karena adanya **dukungan** anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bahwa indikator semua puskesmas sudah tersedia obat minimal 40 item obat dan 5 item vaksin yang tersedia di Puskesmas, tingkat pelayanan kegawatdaruratan bahwa untuk semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sudah mampu mengatasi pasien dengan gawat darurat, dan untuk tingkat mutu pelayanan kesehatan bahwa semua Puskesmas sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan karena dari total 35 Puskesmas sudah dilakukan penilaian akreditasi tingkat Nasional.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada **hambatan atau tantangan** dalam mencapai target, adapun hambatan kadang terkendala karena stok obat di Gudang Farmasi menipis karena adanya pandemi covid-19 berakibat pada pengiriman paket pembelian obat tertunda namun demikian Puskesmas masih bisa mencukupi ketersediaan obat dengan dana BLUD masing-masing Puskesmas.

Solusi atau upaya mempertahankan realisasi indikator Presentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tetap mencapai target akhir RPJMD 2021 adalah selalu melakukan pemantauan dan pendampingan pada seluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan koordinasi dengan Pusat dan Propinsi terkait ketersediaan alokasi obat, meningkatkan kualitas Sumber daya kesehatan dengan mengirim pelatihan kegawat daruratan untuk tenaga kesehatan, rutin mengusulkan dana alokasi khusus untuk kegiatan akreditasi Puskesmas sehingga manajemen mutu pelayanan menjadi semakin meningkat

Pada tahun 2020 indikator ini didukung oleh Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, program upaya peningkatan kesehatan dan program penyusunan standart pelayanan kesehatan dengan di dukung anggaran sebesar Rp 14.748.030.000, dengan realisasi sebesar Rp 11.992.197.600 atau sebesar 81,31 % . Adanya efisiensi 18,69 % karena kegiatan survay akreditasi tidak dilakukan secara offline berhubung adanya Pandemi covid-19, namun mutu manajemen akreditasi tetap berjalan sesuai standart dan dilakukan evaluasi secara online oleh tim mutu akreditasi tingkat kementrian.

23. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai EKPPD tahun 2020 didasarkan pada Nilai EKPPD tahun 2018 sebagaimana Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 2020 dengan nilai 3,3226 atau tercapai dengan realisasi sebesar 110,75% atau dengan capaian kinerja kategori **Sangat Baik**.

Kendala dalam evaluasi nilai EKPPD adalah keterlambatan hasil kinerja tahun n yang selalu diterbitkan Kementerian dalam negeri pada akhir tahun n+1, contohnya nilai EKPPD tahun 2018 disampaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, target nilai yang ingin dicapai adalah Baik/Tinggi, namun sampai dengan disusunnya laporan ini masih belum diterbitkan SK Mendagri tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2019. Sementara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2020 dan belum ada hasil evaluasi.

Adapun beberapa hal yang sangat menghambat dalam pencapaian target adalah:

1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mencermati dan mengevaluasi data kinerja OPD
2. Kemampuan personil yang ditunjuk dalam penyusunan LPPD masih rendah.
3. Tidak adanya evaluasi mandiri OPD atas capaian kinerja yang dijadikan sebagai kelengkapan capaian kinerja daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai EKPPD pada tahun mendatang adalah dengan :

1. Intensifitas koordinasi dengan Kementerian dalam negeri dalam pemahaman juknis penyusunan dan perhitungan indicator kinerja;

2. Dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah terkait kelengkapan dokumen LPPD
3. Dengan OPD se Kabupaten Kebumen terkait kecepatan, ketepatan dan aktualisasi data dukung capaian kinerja.
4. Bimbingan teknis penyusunan LPPD dengan menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri.
5. Desk to desk secara langsung terhadap data dukung yang dihimpun oleh OPD

24. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil penilaian Evaluasi dari Kemenpan dan RB. Dikarenakan sampai dengan laporan ini dibuat Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen belum keluar maka nilai masih berdasarkan nilai pada tahun 2019, dengan realisasi penilaian 61,85 yaitu capaian kinerja sebesar 103,08% dengan kategori **Sangat Baik**.

Adapun rekomendasi LHE SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reuiu secara berkala atas Renstra Perangkat daerah terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja;
- b. Melakukan integrasi aplikasi sim perencanaan, sim KUA PPAS, SIMDA Keuangan yang telah ada dengan aplikasi e-sakip sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja;
- c. Memanfaatkan cascading kinerja dalam menyusun perjanjian kinerja pada tingkat penanggungjawab program dan kegiatan serta melakukan casecading kinerja organisasi setiap perangkat daerah hingga pada level individu;
- d. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi atas implementasi AKIP dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat, BAP3DA dan Bagian Organisasi Setda Kebumen; dan

- f. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Solusi atas hasil rekomendasi LHE SAKIP adalah terhadap RPJMD sudah tidak bisa dilakukan perubahan sehingga difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target untuk didorong capaian kinerjanya, menyusun *Casecading* yang difasilitasi oleh BAP3DA sehingga semua Perangkat Daerah mempunyai dokumen *Casecading*, pelaksanaan Paparan Capaian IKU Bupati Kebumen Tahun 2019 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 oleh Kepala Perangkat Daerah dihadapan Bapak Bupati sehingga diharapkan dapat meningkatkan implementasi AKIP dan Kinerja, Inspektorat menginisiasi Pemberantasan Korupsi dengan mengajukan Perangkat Daerah (Bagian Pembangunan Setda, Inspektorat, BKPPD dan DPMPTSP) sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kemenpan RB serta Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal integrasi sistem perencanaan sampai dengan pelaporan masih pada tahap proses pembangunan sistem.

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Penyerapan anggaran tidak sepenuhnya karena adanya efisiensi dengan menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik (e-Letter) sehingga mengurangi biaya/belanja perjalanan, belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan dikarenakan berkurangnya intensitas undangan keluar daerah dan honor Narasumber tidak terealisasi secara maksimal karena merupakan sisa dari penyediaan dari yang kami rencanakan, karena narasumber yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan yaitu Penyusunan LKjIP Bupati berdasarkan IKU Bupati yang menjadi tanggungjawab beberapa Perangkat Daerah dalam analisis capaian kinerja belum semua Perangkat Daerah mendiskripsikan

dengan jelas usaha/upaya, kendala dan solusi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Solusi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu update aplikasi e-sakip.kebumenkab.go.id sehingga diharapkan nanti semua dokumen SAKIP diupload oleh semua perangkat daerah dan dipublikasikan untuk umum.

25. Opini BPK atas LKPD

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja yang ingin dicapai adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk target tahun 2020 indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD 2019 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Capaian kinerja indikator Opini BPK atas LKPD sebesar 100% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Pemberian Opini WTP dari BPK RI menggambarkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara umum memadai
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hal ini dapat dicapai dengan beberapa upaya perbaikan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah/Aset antara lain;

1. Menindaklanjuti saran/rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dengan berkoordinasi dengan Inspektorat dan SKPD;
2. Tertib penyampaian laporan keuangan;
3. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
4. Mengadakan pelatihan / bimtek dan Sosialisasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan SKPD.
6. Melakukan pendampingan tertib pengelolaan barang milik daerah ke tiap SKPD.
7. Menerapkan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT).

8. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI secara terintegrasi dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu dan SIBUBA.
9. Mengoptimalkan fungsi PPK SKPD antara lain melalui pelaksanaan verifikasi SPJ secara mandiri.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan/kendala dalam pencapaian target yaitu :

- a. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- b. Kurang cermatnya SKPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan
- c. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini SKPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.

Solusi Atau Upaya Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD dan upaya yang akan dilakukan di tahun 2021 adalah:

- a. Komitmen Pimpinan, ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain pemenuhan belanja mandatori, pelaksanaan/implementasi *money follow programe*.
- b. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
- c. Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing SKPD.
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Pada sasaran ini pencapaian indikator sasaran sudah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 atau capaian kinerja 98,75% dengan kriteria capaian kinerja **Baik**. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi tahun 2020 lebih rendah.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran ASN dalam membayar zakat dan target secara garis besar tercapai
2. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui forum forum ke lembaga lembaga pendidikan dan lembaga lainnya

Solusi atau upaya yang dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah melakukan perbaikan sistem pendataan dengan meningkatkan kualitas pelaporan zakat dari masing-masing UPZ, mengidentifikasi kembali permasalahan yang menyebabkan ASN tidak membayar zakat melalui BAZNAS dan meningkatkan kerjasama dengan BAZNAS dalam hal sosialisasi dan pelaporan zakat ASN.

Pada tahun 2020 indikator didukung oleh Program Hibah kepada BAZNAS Kebumen dengan Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang diwujudkan dengan kegiatan sosialisasi kepada ASN dan pentasyarufan zakat kepada masyarakat.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2020 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Kebumen yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Kesetaraan), Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD

Kab.Kebumen Tahun 2016-2020. Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target adalah keterbatasan pada anggaran, kemauan dan keinginan masyarakat yang kurang untuk melanjutkan sekolah atau kembali bersekolah pada usia yang produktif.

3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Indikator ini didukung melalui program dan kegiatan peningkatan Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga

Untuk meningkatkan pengembangan pada bidang kepemudaan dan olahraga memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Capaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas-fasilitas untuk berlatih yang memadai dan juga kesejahteraan para atlet. Pemberian tali asih kepada atlet dikandung maksud untuk meningkatkan semangat atlet dalam bertanding. Peningkatan jumlah anggaran untuk bidang kepemudaan dan olahraga sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian prestasi pemuda dan olahraga. Anggaran sebagian besar adalah sisa tender/efisiensi.

5. Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2020 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total

anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 66.653.590.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 55.724.356.359 - (83.60%).

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 16,40 % karena selisih adanya harga di lapangan, dan beberapa kegiatan tertunda karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

6. Angka Kematian Ibu

Pada tahun 2020 indikator Angka Kematian Ibu didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 67.823.543.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.354.258.309 (74,24%), Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan. Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 25,7 % karena adanya pandemi *Covid-19* namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

7. Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2020 indikator Angka Kematian Bayi didukung oleh beberapa Program antara lain program Kemitraan asuransi pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program upaya perbaikan Gizi masyarakat, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Program obat dan perbekalan kesehatan, Program pengendalian dan pencegahan penyakit, program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp 67.823.543.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.354.258.309 (74,24%), Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan.

Adanya sisa anggaran atau efisiensi sebesar 25,7 % karena adanya pandemi Covid-19 namun secara fisik semua terlaksana 100 %.

8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat preventif untuk mengurangi Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan yang bersifat preventif yaitu : menyelenggarakan program dan kegiatan Bimbingan teknis tentang HIV-AIDS pada guru Bimbingan konseling dan penyuluh agama, sosialisasi HIV-AIDS pada pelajar dan remaja, Pelatihan kepada pendamping ODHA, pelatihan tentang kesehatan pada OHIDHA (orang yang hidup dengan ODHA), penyusunan buku panduan Warga Peduli AIDS (WPA), Sosialisasi buku panduan WPA kepada pendamping Desa, pemberian bantuan dan pelatihan kepada ODHA, program pencegahan HIV AIDS melalui transmisi seksual pada hotspot, pelatihan pengorganisasian Warga Peduli AIDS dan Komunikasi yang intensif antar Kementerian Agama, FKUB, MUI dan Kepolisian.

9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target adalah melakukan upaya peningkatan intensitas kegiatan di masyarakat baik upaya preventive dan represif. Upaya yang akan dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2020 yaitu :

- a. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
- b. Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas
- c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Pengendalian keamanan lingkungan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
- g. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- h. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- i. Penegakan Peraturan Daerah

- j. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
- k. Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum.

Pada masa pandemic covid-19 telah melakukan tindakan penegakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 mulai Bulan Maret 2020 pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan sampai dengan Desember 2020 operasi yang dilaksanakan mencapai 2.120 titik.

10. Penurunan kasus pelanggaran hukum

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 yaitu melalui program dan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan, komunikasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik, patroli, pembinaan serta usaha pemberdayaan masyarakat melalui kader siaga trantib dan pemberdayaan Satlinmas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum selain itu kerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang mengampu pelaksanaan Perda dalam upaya penurunan kasus pelanggaran juga diupayakan dengan kegiatan bersama dalam pembinaan serta kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yang melibatkan unsur Polri dan Kodim 0709 dalam penegakan Perda.

11. Pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan dengan refocusing anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan berbagai strategi antara lain program dan kegiatan bantuan bahan usaha untuk pelaku usaha mikro, bantuan subsidi Bunga, padat karya tunai dan peningkatan ketahanan pangan. Diharapkan program ini dapat membangkitkan perekonomian daerah yang mengalami keterpurukan, yang selanjutnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

12. Pendapatan perkapita penduduk

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Tahun 2020 untuk mendukung ketercapaian indikator ini pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi yang dilaksanakan seluruh OPD.

13. Rasio/ Indeks Gini

Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui berbagai program pembangunan yang menysasar penduduk berpendapatan rendah. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam penerapannya diperlukan adanya sinergitas baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kurangnya sinergitas ini yang seringkali menjadi kendala yang dapat mengurangi keefektifan program. Bila kendala ini dapat ditangani, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD akan dapat dicapai.

14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi

Pendampingan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada Tahun 2020 mendapat anggaran sebesar Rp.205.000.000,-, antara lain rencananya akan digunakan untuk

Pembuatan Vidio Provil (4 Kawasan) dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,-Iklan atau Publikasi di TV Lokal Kebumen (sebanyak 5 acara) dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000,-, penyelenggaraan Louching Kawasan serta mengikuti Pameran Dalam Daerah dalam upaya untuk mensosialisasikan Kawasan Perdesaan kepada masyarakat. Selain hal tersebut anggaran juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan, Pelatihan bagi Pendamping Kawasan, Pelatihan BUMDESMA dan BKAD, pendampingan, pembinaan serta evaluasi Kawasan.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Jumlah anggaran semula pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp. 205.000.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp. 14.496.000,-

Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah fasilitasi bantuan keuangan kawasan perdesaan untuk 22 desa penyangga kawasan sebesar Rp.1.000.000.000,- sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan antara lain digunakan untuk pembelian produk dari petani gula semut, pembelian complong pandan dari pengrajin, pembelian dan pengembangan sapi, pengembangan produk batik printing serta pengembangan sarana dan prasarana wisata desa. Begitu juga dengan peran OPD terkait atau OPD yang menjadi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP), belum dapat memberikan kontribusi sesuai program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan kawasan perdesaan.

Selanjutnya pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan sebesar Rp.101.040.000,- antara lain direncanakan untuk pendampingan dan evaluasi kawasan termasuk fasilitasi bantuan keuangan sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyusunan dan sosialisasi Perbup Kawasan, Perbup RPKP, Perencanaan BUMDESMA Kawasan Perdesaan serta pembuatan Video Provil Kawasan Perdesaan.

15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN

Tidak tercapainya indikator ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor: Secara anggaran terjadi rasionalisasi sebesar 80% pada semua program kegiatan, sementara Kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara daring dan pengurangan volume.

16. Persentase peningkatan kunjungan wisata

Indikator ini didukung dengan Program pengembangan pemasaran pariwisata dan Program pengembangan destinasi pariwisata. Program yang tidak mencapai target adalah Program pengembangan pemasaran pariwisata. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target program adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah daerah untuk menutup aktivitas diantaranya penutupan obyek wisata dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.

17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

Indikator ini didukung dengan program Program Peningkatan Jalan & Jembatan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya. Adapaun program yang tidak mencapai target adalah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Faktor yang menjadi penyebab adalah :

- 1.Masih terdapat lebar Jalan Kabupaten yang belum standar dan lebar RMJ kurang memenuhi kebutuhan lebar jalan standar
- 2.Sebagian besar Jalan Kabupaten terdapat di daerah pegunungan, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih kompleks
- 3.Jalan Kabupaten dilalui Kendaraan ODOL sehingga mengurangi umur ekonomi
- 4.Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang masuk dalam daerah rawan bencana dan berdampak pada infrastruktur.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020 indikator ini didukung oleh Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan program peningkatan pengendalian polusi, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.312.709.000 dan realisasi Rp. 3.206.044.221,- (96,78%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 3,22% merupakan penghematan belanja barang dan jasa

19. Angka Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas/prioritas/unggulan, antara lain:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang sudah dijalankan yaitu :

- a. Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa Siswa Miskin
- b. Bantuan sosial masyarakat (PAMSIMAS, SANIMAS, IPAL KOMUNAL)
- c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin
- d. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- e. Pemberian bantuan ikan konsumsi dan ikan olahan kepada masyarakat miskin

2. Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu Melalui Agribisnis, Agama, Budaya Dan Pendidikan

Program dan kegiatan yang sudah dijalankan antara lain :

- a. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
- b. Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- d. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
- e. Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan
- f. Pembinaan dan pengembangan perikanan
- g. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul
- h. Fasilitasi Kegiatan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT P2K) "Rumah Harapan"

- i. Penyusunan data kemiskinan
 - j. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
3. Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Program dan kegiatan yang sudah dijalankan meliputi :

- a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan meliputi :
 - 1) Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
 - 2) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
 - 3) Pembinaan Pasar Desa
- b. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - 1) Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
 - 2) Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 3) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 1) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 1) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, IK, Industri menengah
 - 2) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
- e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah.
- f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
- g. Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - 1) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
 - 2) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

- 3) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
 - 4) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
 - 5) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)
- h. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD.
4. Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh TKP2KD Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Pelatihan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)
 - b. Rapat Koordinasi Terkait Rencana Integrasi dan Sinkronisasi Data Kemiskinan
 - c. Workshop Penguatan Kapasitas TKP2KDes/Kel dan Kecamatan Kebumen Tahun 2020
 - d. Konsultasi ke Kemensos RI Terkait Upaya Sinkronisasi dan Integrasi Data Kemiskinan
 - e. Rakor TKP2KD ke III, Rakor TKP2KD ke IV, Rakor TKPKD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kebumen sekaligus Rakor TKP2KD ke V dan Rakor TKP2KD ke VI
 - f. Workshop Peningkatan Kapasitas TKP2KD
 - g. Kunjungan Kemensos RI Terkait Rencana SLRT di Kabupaten Kebumen
 - h. Rapat Mengenai data Kemiskinan
 - i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) KabupatenKebumen

20. Angka Pengangguran

Upaya/peran nyata Kabupaten Kebumen dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2020 antara lain:

1. Mengurangi efek pengangguran terbuka dengan mengadakan kegiatan padat karya yang memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur;

2. Memberikan bantuan UMKM bagi yang terdampak covid 19, sehingga dapat bertahan di masa pandemic dan diharapkan dapat tumbuh dan menjadi umkm naik kelas membuka lapangan kerja;
3. Memfasilitasi pengantar kerja dalam dan luar negeri dimana kantong-kantong penerimaan tenaga kerja masih banyak yang diluar daerah dan luar negeri;
4. Memberikan pelatihan eks imigran sehingga memiliki ketrampilan wirausaha baru, diharapkan dengan itu mereka dan berusaha dan membuka lapangan kerja dan tidak kembali menjadi pekerja imigran.

21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Indikator ini didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan Pembangunan gedung sekolah, Penambahan ruang kelas sekolah, Pengadaan mebeluer sekolah, Pengadaan mebeluer sekolah, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar, Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, serta Program Pendidikan Anak Usia Dini melalui kegiatan Pembangunan gedung sekolah dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pada tahun 2020 indikator ini didukung oleh Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, program upaya peningkatan kesehatan dan program penyusunan standart pelayanan kesehatan dengan di dukung anggaran sebesar Rp 14.748.030.000, dengan realisasi sebesar Rp 11.992.197.600 atau sebesar 81,31 % . Adanya efisiensi 18,69 % karena kegiatan survay akreditasi tidak dilakukan secara offline berhubung adanya Pandemi covid-19, namun mutu manajemen akreditasi teap berjalan sesuai standart dan dilakukan evaluasi secara online oleh tim mutu akreditasi tingkat kementrian.

23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar Kepala Daerah. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

24. Nilai akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kebumen merupakan hasil kerja bersama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tersebut, secara khusus dilaksanakan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

25. Opini BPK atas LKPD

Indikator ini didukung oleh Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Pada tahun 2020 indikator didukung oleh Program Hibah kepada BAZNAS Kebumen dengan Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang diwujudkan dengan kegiatan sosialisasi kepada ASN dan pentasyarufan zakat kepada masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Efisiensi program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja daerah perlu dicermati dan dievaluasi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah –rendahnya.

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Rumus pengukuran persentase efisiensi biaya didapatkan dari 100% dikurangi Persen capaian Realisasi anggaran belanja dibagi dengan target anggaran belanja. Adapun gambaran efisiensi anggaran dalam mendukung capain kinerja daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dengan capaian kategori interpretasi Tinggi, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal, terdapat efisiensi anggaran sebesar 69,70%. Hal ini dapat dilihat dari total pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai kinerja utama Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 1.007.417.060.000,- dengan realisasi Rp. 874.917.305.390,- atau penyerapan anggaran sebesar 86,85%.

Tabel 1.
Analisis Efisiensi Anggaran Yang Mendukung IKU

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	547.529.000	530.459.400	96,88%	3,12%
2	Program BLUD	217.390.398.000	214.182.873.026	98,52%	1,48%
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	124.929.000	122.291.750	97,89%	2,11%
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	30.000.000	29.032.900	96,78%	3,22%
5	Program Keluarga Berencana	10.364.477.000	9.550.031.292	92,14%	7,86%
6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	115.872.000	102.673.530	88,61%	11,39%
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	23.556.807.000	16.703.520.008	70,91%	29,09%
8	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.426.750.000	2.291.789.300	94,44%	5,56%
9	Program Kerjasama Pembangunan	14.801.000	14.492.980	97,92%	2,08%
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	641.337.000	623.128.264	97,16%	2,84%
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	714.735.000	678.889.900	94,98%	5,02%
12	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	856.000	840.000	98,13%	1,87%
13	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.896.688.000	9.829.127.539	99,32%	0,68%
14	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	888.141.000	884.704.874	99,61%	0,39%
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.566.027.000	43.402.794.041	87,57%	12,43%
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.364.486.000	6.278.509.062	98,65%	1,35%
17	Program pelayanan kontrasepsi	167.013.000	137.593.347	82,38%	17,62%
18	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	14.074.937.000	13.052.509.620	92,74%	7,26%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
19	Program pembangunan jalan dan jembatan	6.777.965.000	6.258.988.200	92,34%	7,66%
20	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.527.157.000	5.318.654.150	96,23%	3,77%
21	Program pembangunan turap/talud/bronjong	1.335.862.000	1.312.685.800	98,27%	1,73%
22	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	638.479.000	627.955.486	98,35%	1,65%
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	793.413.000	768.368.188	96,84%	3,16%
24	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	349.727.000	349.247.700	99,86%	0,14%
25	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	37.131.000	36.323.000	97,82%	2,18%
26	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	138.640.000	134.568.100	97,06%	2,94%
27	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	3.469.325.000	3.352.486.428	96,63%	3,37%
28	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.048.159.000	962.995.689	91,87%	8,13%
29	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2.158.611.000	1.758.831.796	81,48%	18,52%
30	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	13.983.511.000	12.167.922.003	87,02%	12,98%
31	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	131.740.000	129.015.588	97,93%	2,07%
32	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	298.590.000	294.518.237	98,64%	1,36%
33	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	201.122.000	190.716.862	94,83%	5,17%
34	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	4.692.999.000	4.622.059.024	98,49%	1,51%
35	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.803.846.000	5.003.578.280	86,21%	13,79%
36	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	122.485.000	119.840.361	97,84%	2,16%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
37	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	638.453.000	591.811.812	92,69%	7,31%
38	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.088.988.000	896.340.815	82,31%	17,69%
39	Program penataan struktur industri	50.908.000	31.851.298	62,57%	37,43%
40	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.824.889.000	2.694.570.325	95,39%	4,61%
41	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	381.486.000	376.466.400	98,68%	1,32%
42	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2.148.028.000	1.599.632.500	74,47%	25,53%
43	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	186.204.000	173.385.500	93,12%	6,88%
44	Program Pendidikan Anak Usia Dini	8.968.596.000	8.723.723.364	97,27%	2,73%
45	Program Pendidikan Kedinasan	830.587.000	704.949.601	84,87%	15,13%
46	Program Pendidikan Non Formal	1.796.516.000	1.776.702.780	98,90%	1,10%
47	Program pendidikan politik masyarakat	320.602.000	317.915.000	99,16%	0,84%
48	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	22.314.348.000	20.740.073.763	92,95%	7,05%
49	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	14.928.254.000	897.920.906	6,01%	93,99%
50	Program Pengawasan Obat dan Makanan	527.656.000	517.452.688	98,07%	1,93%
51	Program pengelolaan areal pemakaman	322.875.000	295.576.267	91,55%	8,45%
52	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	83.955.000	79.450.594	94,63%	5,37%
53	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	237.825.000	227.268.809	95,56%	4,44%
54	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.084.663.000	1.926.740.194	92,42%	7,58%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
55	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	549.582.000	534.340.336	97,23%	2,77%
56	Program pengembangan budidaya perikanan	9.210.236.000	8.339.779.726	90,55%	9,45%
57	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	42.463.946.000	39.723.347.741	93,55%	6,45%
58	Program pengembangan data/informasi	1.936.560.000	1.793.046.914	92,59%	7,41%
59	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	858.591.000	843.653.686	98,26%	1,74%
60	Program pengembangan destinasi pariwisata	6.525.706.000	6.082.881.967	93,21%	6,79%
61	Program pengembangan industri kecil dan menengah	950.352.000	920.338.888	96,84%	3,16%
62	Program pengembangan Kemitraan	2.141.322.000	2.084.149.470	97,33%	2,67%
63	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.586.408.000	1.211.263.822	76,35%	23,65%
64	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.650.123.000	3.594.062.018	98,46%	1,54%
65	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.686.023.000	8.438.832.727	97,15%	2,85%
66	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.711.518.000	3.616.584.855	97,44%	2,56%
67	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	99.534.000	96.297.448	96,75%	3,25%
68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.295.053.000	1.148.611.550	88,69%	11,31%
69	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.066.208.000	1.007.738.638	94,52%	5,48%
70	Program pengembangan perikanan tangkap	2.401.169.000	2.310.036.609	96,20%	3,80%
71	Program Pengembangan Perumahan	1.444.195.000	1.355.013.768	93,82%	6,18%
72	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	53.820.000	52.060.100	96,73%	3,27%
73	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	450.734.000	288.028.300	63,90%	36,10%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	Menengah				
74	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.049.904.000	381.674.703	36,35%	63,65%
75	Program pengembangan wilayah transmigrasi	2.250.000	2.250.000	100,00%	0,00%
76	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	4.130.247.000	4.007.143.300	97,02%	2,98%
77	Program Pengendalian Banjir	6.792.208.000	6.495.710.756	95,63%	4,37%
78	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.651.793.000	3.456.648.715	94,66%	5,34%
79	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	182.975.000	152.835.609	83,53%	16,47%
80	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.788.758.000	1.740.985.659	97,33%	2,67%
81	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	252.382.000	241.154.943	95,55%	4,45%
82	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	272.915.000	269.672.700	98,81%	1,19%
83	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	115.006.000	109.232.808	94,98%	5,02%
84	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.717.719.000	7.409.352.984	96,00%	4,00%
85	Program peningkatan disiplin aparatur	592.587.000	572.115.545	96,55%	3,45%
86	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	6.724.246.000	6.174.287.004	91,82%	8,18%
87	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	46.892.065.000	44.472.418.100	94,84%	5,16%
88	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	365.600.000	362.512.724	99,16%	0,84%
89	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	25.132.000	24.868.500	98,95%	1,05%
90	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	545.404.000	535.840.959	98,25%	1,75%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
91	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12.261.496.000	8.552.184.096	69,75%	30,25%
92	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	302.854.000	270.474.546	89,31%	10,69%
93	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	941.686.000	898.064.742	95,37%	4,63%
94	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.312.473.000	4.089.288.600	94,82%	5,18%
95	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	395.454.000	374.242.879	94,64%	5,36%
96	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	2.498.044.000	2.397.622.500	95,98%	4,02%
97	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.060.471.000	2.020.848.448	98,08%	1,92%
98	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.464.854.000	4.309.061.742	96,51%	3,49%
99	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.111.630.000	978.277.936	88,00%	12,00%
100	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	7.003.375.000	6.670.976.799	95,25%	4,75%
101	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	196.047.000	156.009.754	79,58%	20,42%
102	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	933.419.000	776.923.100	83,23%	16,77%
103	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	325.032.000	294.639.007	90,65%	9,35%
104	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	275.452.000	273.529.150	99,30%	0,70%
105	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.517.687.000	16.712.176.582	95,40%	4,60%
106	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2.369.128.000	2.225.208.548	93,93%	6,07%
107	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	596.750.000	555.360.468	93,06%	6,94%
108	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.686.821.000	569.209.947	33,74%	66,26%
109	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	45.437.000	45.217.200	99,52%	0,48%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
110	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	197.799.000	193.611.650	97,88%	2,12%
111	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	42.372.000	41.728.215	98,48%	1,52%
112	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	180.670.000	167.254.885	92,57%	7,43%
113	Program peningkatan pengendalian polusi	431.454.000	425.376.200	98,59%	1,41%
114	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	562.657.000	537.325.772	95,50%	4,50%
115	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	31.019.000	30.587.562	98,61%	1,39%
116	Program peningkatan peran serta kepemudaan	534.460.000	475.842.300	89,03%	10,97%
117	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.268.842.000	1.180.186.140	93,01%	6,99%
118	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.840.875.000	2.657.256.100	93,54%	6,46%
119	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	115.842.000	105.499.792	91,07%	8,93%
120	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	279.543.000	275.293.407	98,48%	1,52%
121	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.836.001.000	27.719.697.879	77,35%	22,65%
122	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	149.535.000	148.449.125	99,27%	0,73%
123	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	669.961.000	647.748.550	96,68%	3,32%
124	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	9.415.807.000	8.031.202.900	85,29%	14,71%
125	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.671.447.000	3.338.931.904	58,87%	41,13%
126	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	56.000.000	51.091.100	91,23%	8,77%
127	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	311.000.000	308.745.000	99,27%	0,73%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
128	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	246.367.000	243.340.200	98,77%	1,23%
129	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	237.655.000	230.752.000	97,10%	2,90%
130	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	406.408.000	396.618.172	97,59%	2,41%
131	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.910.740.000	2.483.909.687	85,34%	14,66%
132	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	200.000.000	198.406.864	99,20%	0,80%
133	Program perencanaan pembangunan daerah	1.835.093.000	1.779.819.793	96,99%	3,01%
134	Program perencanaan pembangunan ekonomi	500.620.000	461.042.365	92,09%	7,91%
135	Program perencanaan sosial dan budaya	1.640.940.000	1.633.354.200	99,54%	0,46%
136	Program Perencanaan Tata Ruang	170.868.000	134.616.890	78,78%	21,22%
137	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	126.279.000	124.830.490	98,85%	1,15%
138	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	168.434.000	162.732.800	96,62%	3,38%
139	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	240.296.000	232.443.260	96,73%	3,27%
140	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	122.223.000	122.223.000	100,00%	0,00%
141	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	222.388.000	217.622.830	97,86%	2,14%
142	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	770.171.000	758.842.118	98,53%	1,47%
143	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	58.760.987.000	56.197.903.936	95,64%	4,36%
144	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.802.686.000	849.323.963	30,30%	69,70%
145	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	3.255.000.000	3.119.207.500	95,83%	4,17%
146	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	39.006.752.000	45.110.353.646	115,65%	-15,65%
147	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	161.588.110.000	97.710.195.238	60,47%	39,53%

No	Nama Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
148	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	547.529.000	530.459.400	96,88%	3,12%
149	Program BLUD	217.390.398.000	214.182.873.026	98,52%	1,48%
150	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	124.929.000	122.291.750	97,89%	2,11%
151	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	30.000.000	29.032.900	96,78%	3,22%
JUMLAH		1.007.417.060.000	874.917.305.390	86,85%	13,15%

Sumber : BPKAD Kab Kebumen 2020
Ket : Data Belum Audit

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.4.039600/2020 dan DIPA-026.04.4.039596/2020. Tugas Pembantuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) untuk pembangunan Pasar Kabekelan di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun dan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 576.390.000 (*lima ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah*) untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja.

3.1.2. Realisasi

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keruangan dari target Rp. 3.076.390.000, terealisasi Rp. 3.043.375.500 atau sebesar 99%.

Tabel 3. 1

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2020

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1.	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja	DIPA-026.04.4.039596/2020	Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Tenaga Kerja yang diperdayakan melalui sistem padat karya (60 orang)	Kab. Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	151.500.000	148.769.400	98,20	60 orang	100	
			Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Wirausaha Baru (120 orang)	Kab. Kebumen	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	360.000.000	354.676.100	98,52	120 orang	100	
			Program : Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja / Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja / Administrasi Dana Tugas Pembantuan		Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen	64.890.000	52.895.000	81,51	-	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
2.	Kementrian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2020	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Kegiatan sarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	Desa Kabekelan, Ke. Prembun Kab. Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen	2.500.000.000	2.487.035.000	99,48	1	100	

Sumber : data diolah 2020

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1. Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan.

3.2.2. Realisasi

Tidak ada realisasi karena tidak terdapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala.

3.4. Saran dan Tindaklanjut

Tidak ada.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di satuan pendidikan anak usia dini	
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun informal (APS PAUD 5-6 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan formal maupun informal (APS PAUD 5-6 Tahun)	100%
	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam pendidikan formal maupun informal			
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD/Mi, SMP/MTs)	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET SPM
		(APM SD/Mi, SMP/MTs)	Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	
		Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun nonformal (APS Usia 7-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun nonformal (APS Usia 7-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah)	100%
		Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	
		Jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan formal SD/MI dan SMP/MTs (APK Usia 7-15 tahun- Angka Partisipasi Kasar)	Jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan formal SD/MI dan SMP/MTs (APK Usia 7-15 tahun- Angka Partisipasi Kasar)	100%
		Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100%
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	

4.1.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	27	121
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di satuan pendidikan anak usia dini	22	
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun informal (APS PAUD 5-6 Tahun)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan formal maupun informal (APS PAUD 5-6 Tahun)	27	121
			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dalam pendidikan formal maupun informal	22	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD/Mi, SMP/MTs)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM SD/Mi, SMP/MTs)	142,382	75,80
			Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	188	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun nonformal (APS Usia 7-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan formal maupun nonformal (APS Usia 7-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah)	175,633	93,51
			Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	187,829	
		Jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan formal SD/MI dan SMP/MTs (APK Usia 7-15 tahun- Angka Partisipasi Kasar)	Jumlah Warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan formal SD/MI dan SMP/MTs (APK Usia 7-15 tahun- Angka Partisipasi Kasar)	142,382	75,80
			Jml Penduduk (sesuai Jenis Layanan)	188	
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	671	100
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	671	

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Kebumen
 Hasil desk tanggal 22 Januari 2021

4.1.4. Alokasi anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM sebesar Rp. 129.404.311.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.762.137.455 atau sebesar 98%.

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Bupati Kebumen
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
- d. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
- e. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
- e. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
10. Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
11. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
13. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Disebabkan faktor motivasi, kecenderungan dari masyarakat di Kabupaten Kebumen yang menganggap bahwa pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya dianggap penting
2. Ada kecenderungan bahwa yang disebut dengan sekolah dimulai dari tingkat Sekolah Dasar
3. Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia 6 tahun

4. Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah
 5. Sebagian dari anak putus sekolah/tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 karena alasan bekerja diluar kota
 6. Gap/selisih/Perbedaan angka pembagi jumlah penduduk usia sekolah dari Disdukcapil dan dari BPS cukup tinggi, mulai tahun 2018 angka menggunakan data dari Disdukcapil
 7. Masih banyak terdapat siswa yang berusia 15 tahun tetapi sudah masuk dijenjang SMA/SMK sederajat (16-18)
 8. Faktor kemiskinan dan perpindahan penduduk kebumen yang bekerja di luarkota membawa serta anak dan keluarga keluar dari Kebumen
 9. Pernikahan di usia dini
 10. Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah
 11. Sebagian dari anak putus sekolah dan tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 karena alasan bekerja diluar kota
- b. Solusi
1. Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini melalui penguatan peran Bunda PAUD
 2. Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini melalui penguatan peran Bunda PAUD
 3. Intervensi program kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021
 4. Melaksanakan Pengumpulan data untuk perhitungan APM-APS dan APK, analisis hasil pengolahan data dan melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pencapaian SPM
 5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, berkenaan dengan data individu penduduk pada rentang usia sekolah 7-18 tahun dan program pemenuhan pencapaian target SPM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Meningkatkan layanan bidang Pendidikan Dasar pada Sekolah dan Lembaga pendidikan yang tersedia
7. Koordinasi dengan Disdukcapil dan BPS
8. Intervensi Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021
9. Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (BKM)
10. Intervensi Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kab.Kebumen Tahun 2016-2021
11. Melaksanakan program pendidikan kesetaraan
12. Menggandeng PKBM dan Pemerintah Desa untuk secara bersama memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan melalui gerakan kembali ke sekolah
13. Menggandeng PKBM dan Pemerintah Desa untuk secara bersama memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan melalui gerakan kembali ke sekolah
14. Melaksanakan Pengumpulan data untuk Anak Tidak Sekolah- Anak tidak melanjutkan dan Anak Putus Sekolah, analisis hasil pengolahan data dan melakukan gerakan kembali ke sekolah
15. Meningkatkan layanan bidang Pendidikan Non Formal pada lembaga-lembaga yang tersedia dan mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan nonformal (PKBM) pada daerah-daerah yang masih banyak terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah pada usia 7-18 tahun

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 3

Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	100%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	100%
			Jumlah Balita usia 12-59 bulan diwilayah kerja kab tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	
6	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Penduduk usia lansia	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	
7	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Penduduk usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.	100%
			Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

4.2.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 4

Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	19.513	100%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	19.526	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	19.473	100%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	19.526	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	19.372	99%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	19.548	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	90512	97%
			Jumlah Balita usia 12-59 bulan diwilayah kerja kab tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	93524	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100.263	66%
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	151.321	
6	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Penduduk usia lansia	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	120.996	69%
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	176.156	
7	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Penduduk usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun	380.551	46%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			waktu satu tahun		
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	827.260	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	76.363	70%
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	108.911	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	127.04	98%
			Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	13.006	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.372	97%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	3.464	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.		
			Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.		
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20.702	92%
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	227	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2020

4.2.4. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan dengan Pagu sebesar Rp.2,603,231,800.00 dengan realisasi Rp. 1,505,597,043.00 atau capaian 57,83%.

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah disebutkan diatas pada SPM Pendidikan.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum seluruh desa terbentuk Posbindu, Terbatasnya sarana prasana (Posbindu Kit dan Reagen), Usia produktif belum terkskrining secara optimal dikarenakan penduduk sehat belum semua terjaring dalam kegiatan posbindu.
2. Belum semua penderita HT terjaring ke fasyankes karena masih merasa sehat sehingga belum mendapat pelayanan HT, Belum optimalnya pelaporan pelayanan penderita HT dari RS, BPS, DPS, Klinik Swasta, dan UKBM/Posbindu PTM.
3. Belum semua penderita HT terjaring ke fasyankes karena masih merasa sehat sehingga belum mendapat pelayanan DM, Belum optimalnya pelaporan pelayanan penderita DM dari RS, BPS, DPS, Klinik Swasta, dan UKBM/Posbindu PTM.
4. Belum semua ODGJ terobati karena keluarga yang mempunyai ODGJ merasa malu dan enggan/menolak untuk membawa ke pelayanan kesehatan, Belum adanya Pemantau Minum Obat (PMO) sehingga masih banyak ODGJ putus obat.
5. Belum maksimalnya investigasi kontak penderita TBC dan masih mengandalkan survailans pasif, screning pada Ponpes dan lapas belum maksimal
6. Tidak semua orang beresiko mau atau bersedia diperiksa walaupun sudah dilakukan VCT

b. Solusi

1. Pengembangan Posbindu di Desa, Sekolah dan OPD, Meningkatkan gerakan skrining usia produktif selain di posbindu desa misalnya di

kegiatan masyarakat seperti arisan, pengajian, sholat jumat (posbindu mobile) untuk menjaring masyarakat yang sehat.

2. Meningkatkan gerakan skrining posbindu desa untuk menjaring penderita HT yang belum diperiksa di fasyankes dan meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, DPS, BPS untuk pelaporan pemeriksaan/pelayanan HT.
3. Meningkatkan gerakan skrining posbindu desa untuk menjaring penderita DM yang belum diperiksa di fasyankes dan meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, DPS, BPS untuk pelaporan pemeriksaan/pelayanan DM.
4. Upaya edukasi keluarga yang mempunyai kasus ODGJ dan pembentukan DSSJ.
5. Meningkatkan gerakan screening pada ponpes dan lapas, meningkatkan kapasitas Program TB
6. Meningkatkan sosialisasi tentang HIV kepada masyarakat

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

4.3.2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Target pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 5

Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Kumulatif Masyarakat/Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kabupaten	100
			Jumlah Total Proyeksi Rumah	

			Tangga	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah n Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	100
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	

4.3.3. Realisasi

Tabel 4. 6

Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Kumulatif Masyarakat/Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kabupaten	301.109	86,40%
			Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga	348.510	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah n Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	312.137	90,95%
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	343.190	

Sumber : DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020

4.3.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2020 adalah Rp 3,710,865,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 3,710,865,000.00 atau capaian sebesar 100%.

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pelayanan pengolahan air limbah domestik ada penurunan pelayanan karena ada pembangunan penambahan kolam limbah untuk peningkatan pelayanan

b. Solusi

1. Merencanakan memperluas wilayah penanganan pengolahan air limbah domestik dengan pembangunan IPLT di wilayah barat di Desa Semali kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kebumen; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Kebumen

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 7

Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
			jumlah warga negara korban bencana yang seharusnya memperoleh rumah layak huni	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	

4.4.1. Realisasi

Tabel 4. 8

Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	9	100%
			jumlah warga negara korban bencana yang seharusnya memperoleh rumah layak huni	9	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	0	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		penyediaan rumah yang layak huni	yang layak huni		
			Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	

Sumber Data : DISPERKIM LH Kabupaten Kebumen, 2020

4.4.3. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020 adalah Rp 603,000,000.00- dengan realisasi sebesar Rp 270,000,000.00 atau capaian sebesar 44,77%.

4.4.4. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.4.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen memiliki potensi rawan bencana (tanah longsor) sehingga perlu diantisipasi penanganannya
2. Beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen memiliki potensi rawan bencana (tanah longsor) yang mengakibatkan kerusakan rumah dan memerlukan Relokasi

b. Solusi

1. Merencanakan program dan kegiatan untuk penanganan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dalam dokumen perencanaan
2. Merencanakan program dan kegiatan untuk penanganan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dalam dokumen perencanaan

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 9

Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	jumlah warga yang melaporkan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
			jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	
			jumlah warga yang melaporkan karena terkena cedera fisik ringan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%
			jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena cedera fisik ringan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana		
		- Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	100%
		b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana		
		- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
		- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
		- Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	100%
		b. Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)		
		- Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	100%
		c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi		
		- Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	100%
		d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		
		- Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100%
		e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		
		- Persentase jumlah Warga Negara yang Mendapat layanan	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
		pusdalops Penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	
		f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		- Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	100%
			Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas		
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
			Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana yang menjadi korban bencana	
		b. Respon cepat darurat bencana		
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	100%
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	
		c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		
		- Persentase (%) jumlah petugas	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
		yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	
		d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		
		- Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	100%
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
		- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah	100%
			Jumlah kasus kebakaran di kabupaten	
		b. Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk/dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
		- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
		Evakuasi korban kebakaran	pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten pada Tahun X	

4.5.3. Realisasi

Tabel 4. 10

Target Pencapaian SPM Trantibum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	jumlah warga yang melaporkan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0%
			jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena kerugian material dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	
			jumlah warga yang melaporkan karena terkena cedera fisik ringan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			jumlah warga yang mendapat pelayanan terkena cedera fisik ringan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	c. Penyusunan Kajian Resiko Bencana			
		- Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1	100%
			Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	1	
		d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana			
		- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	213.342	3,85%
			Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	669.909	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	g. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)			
		- Persentase penyelesaian	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	1	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		n dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	1	
		h. Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)			
		- Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	4	100%
			Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	4	
		i. Pelatihan pencegahan dan mitigasi			
		- Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	712	0,11%
			Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	669.909	
		j. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana			
		- Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	52.500	7,84%
			Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	669.909	
		k. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		- Persentase jumlah Warga Negara yang Mendapat layanan pusdalops	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	669.909	100%
		pusdalops Penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	669.909	
		l. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		- Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	0	0%
		Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	669.909	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	e. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas			
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	81	100%
			Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana yang menjadi korban bencana	81	
		f. Respon cepat darurat bencana			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI(%)
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	2 2	100%
		g. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana			
		- Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	28 28	100%
		h. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana			
		- Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	646 646	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	c. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI(%)
		- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah	65	100%
			Jumlah kasus kebakaran di kabupaten	65	
		d. Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk/dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
		- Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	0	100%
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten pada Tahun X	0	

Sumber data : BPBD Kabupaten Kebumen
SAtpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2020

4.5.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Trantibum Tahun 2020 adalah Rp 5,948,269,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 5,518,361,678.00 atau capaian sebesar 92,72%.

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi untuk menjangkau daerah yang sulit seperti Daerah yah dan sekitarnya, Sadang dan sekitarnya belum cukup tersedia, kurangnya pos pemadam, kurangnya personil anggota pemadam dan penyelamatan (1 regu minimal 6 orang saat ini baru 3-4 orang)
2. Penolakan dari pelanggar untuk ditertibkan, premanisme, kurangnya deteksi dini dan negosiasi
3. Belum disusunnya Kajian Resiko Bencana
4. Masyarakat kabupaten kebumen yang terlayani melalui informasi peta rawan bencana sampai tahun 2019 sejumlah 4 (empat) kecamatan dari 26 kecamatan
5. Belum semua masyarakat rawan bencana mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan, baru sebatas kelompok dan relawan
6. Keterbatasan SDM baik aparatur maupun tenaga ahli (fasilitator Destana)
7. Terbatasnya Sarana prasarana evakuasi korban bencana
8. Terbatasnya kemampuan SDM untuk evakuasi korban

b. Solusi

1. mengutamakan kegiatan preventif dan Premtif dalam pelaksanaan kegiatan secara humanis sehingga tidak menimbulkan korban akibat penegakan Perda dan Perkada
2. Pemberdayaan Satlinmas dan masyarakat yang dilatih penanggulangan kebakaran
3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat
4. Perencanaan secara bertahap penyusunan Kajian Resiko Bencana
5. Secara bertahap dilakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen (26 kecamatan)
6. Menyelenggarakan sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat
7. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta rekrutment fasilitator Destana
8. Pelaksanaan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai Standar Pelayanan

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Kebumen.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 11

Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1	penyandang disabilitas terlantar	1. penyandang disabilitas terlantar	jumlah penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
		2. anak terlantar		
		3. lanjut usia terlantar dan	Jlh. populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
		4. gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah penyandang , anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
			Jlh populasi anak terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
			Jumlah populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
			Jumlah populasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota		Jumlah populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	

4.6.3. Realisasi

Tabel 4. 12

Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1	penyandang disabilitas terlantar	1. penyandang disabilitas terlantar	jumlah penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	618	100%
		2. anak terlantar			
		3. lanjut usia terlantar dan			
		4. gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jlh. populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	3.171	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	jumlah penyandang , anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	395	100%
			Jlh populasi anak terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	1.228	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di	Jumlah lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	6.222	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
	luar panti	sosial di luar panti	Jumlah populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	11.674	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	131	100%
			Jumlah populasi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi dasar diluar panti	443	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.000	100%
			Jumlah populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	1.000	

Sumber Data : DINSOS PPKAB Kabupaten Kebumen, 2020

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mencapai SPM Sosial sebesar Rp. 1,541,078,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,535,497,324.00 atau dengan capaian 99.64%

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060 / 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/1167 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. belum validnya disabilitas terlantar diluar panti
2. belum validnya data anak terlantar diluar panti
3. belum validnya data lansia terlantar diluar panti
4. belum validnya data pengemis dan gelandangan diluar panti
5. jumlah relawan bencana yang masih terbatas
6. kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan sosial khususnya untuk korban kebakaran

b. Solusi

- a. verifikasi dan validasi data
- b. rekrutmen anggota TAGANA baru dan peningkatan kapasitas anggota TAGANA atau relawan baru
- c. sosialisasi kepada masyarakat tentang cara dan prosedur permohonan bantuan

4.7. Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2020 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pendukung :
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - Pengadaan perlengkapan sekolah
 - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
 - Perencanaan dan Penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Belajar 9 Tahun
 - Pembangunan gedung sekolah
 - Penambahan ruang kelas sekolah
 - Pengadaan mebeluer sekolah
 - Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
 - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
 - Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
 - Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)
 - Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB
 - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP
 - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD
 - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK)
 - Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)
 - Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK
 3. Program Pendidikan Non Formal
 - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
 - Pengembangan kebijakan pendidikan nonformal
 - Pengembangan sertifikasi pendidikan nonformal
- b. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan
 1. Program peningkatan pelayanan anak balita
 - Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
 2. Program Peningkatan Gizi Masyarakat

- Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
- 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- 4. Program Upaya kesehatan masyarakat
 - Kegiatan Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular
- 5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- c. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum
 - 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah peningkatan pelayanan anak balita
 - Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 - Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
 - 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana air Bersih Perdesaan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
- d. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan dan Permukiman
 - 1. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana kabupaten
 - Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana kabupaten
- e. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Trantibum
 - 1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah
 - 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
 - 3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pengendalian keamanan lingkungan
 - 4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
- 5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
- 6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- f. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial
 - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
 - pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
 - pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom untuk menciptakan *clean governance* serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan program dan kegiatan di semua urusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2020.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ini di harapkan akan menjadi titik tolak untuk mengarahkan cara pandang bagi perbaikan pembangunan di Kabupaten Kebumen kedepan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen diuntut untuk bisa menjadi lebih baik khususnya dalam menjawab permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun LPPD ini di pandang bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka tetapi juga harus bisa menjadi semacam upaya moral agar penyelenggaraan pemerintah tetap memberikan perhatian lebih dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.